

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA
DALAM PENOLAKAN PENGUNGSI MASA
PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Minat Utama Transformasi Global

Oleh:

Wisnu Ady Septian

NIM. 125120401111010



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM PENOLAKAN PENGUNGSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO TAHUN 2015-2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

Wisnu Ady Septian
NIM. 125120401111010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Aswin Ariyanti Azis, S.IP., M.DevSt.
NIP. 197802202010121001
Tanggal 10 Desember 2018

Ni Komang Desy S.A.P., S.IP., M.Si.
NIP. 2011028412302001
Tanggal 10 Desember 2018

Mengetahui,

Kemsa Program Studi
Hubungan Internasional

Aswin Ariyanti Azis, S.IP., M.DevSt.
NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM
PENOLAKAN PENGUNGSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO
TAHUN 2015-2017

SKRIPSI

Disusun oleh:


Wisnu Ady Septian
NIM. 125120401111010


Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada tanggal 10 Desember 2018

Tim Penguji,

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,


Yustika Citra Mayendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001


Firstyarinda Valentina I., S.Sos., M.Si
NIP. 2013098602142001


Tanggal: 10 Desember 2018

Tanggal 10 Desember 2018

Anggota Majelis Penguji I,

Anggota Majelis Penguji II,


Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
NIP. 197802202010121001


Ni Komang Desy S.A.P., S.IP., M.Si
NIP. 2011028412302001

Malang, 10 Desember 2018.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Irm Ludigdo Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Ady Septian

NIM : 125120401111010

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Prodi : Hubungan Internasional

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM
PENOLAKAN PENGUNGSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO
TAHUN 2015-2017**

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan sejauh yang saya ketahui, bukan merupakan tiruan/duplikasi/plagiat dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Brawijaya maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun. Adapun materi yang bukan berasal dari karya dan pemikiran saya, telah dikutip dengan mencantumkan sumber asli, melalui sitasi dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku, berupa pencabutan predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 27 Desember 2018

Yang membuat Pernyataan,

Wisnu Ady Septian

NIM. 125120401111010

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum wa rohmatullohii wa barokaatuh

Segala puji hanya bagi Alloh dan Sholawat kepada Nabi Muhammad *Shollallohu 'alayhi wasallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM PENOLAKAN PENGUNSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO TAHUN 2015-2017”**.

Penulisan skripsi ini mendasarkan pada analisis pengambilan keputusan penolakan Polandia terhadap pengungsi pada saat krisis pengungsi di kawasan Eropa yang kemudian dikeluarkan sebuah kebijakan oleh Dewan Eropa untuk merelokasi pengungsi yang berada di Italia dan Yunani ke negara-negara anggota Uni Eropa pada tahun 2015 sampai 2017 sebagai bentuk solidaritas sesama anggota. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasil baik yang penulis peroleh tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak dengan segala kontribusinya, baik secara moral, maupun material. Atas dukungan tersebut, izinkan penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt., selaku Ketua Program Studi hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis. Penulis sangat berterima kasih atas bimbingan, arahan, serta dukungan Beliau dari awal penyusunan hingga penulis menyelesaikan skripsi dengan hasil terbaik. Beliau tidak hanya berperan sebagai dosen pembimbing bagi penulis, melainkan panutan bagi penulis bisa bangkit dan semangat menyelesaikan studi. Rasa hormat dan kebanggaan penulis haturkan kepada Beliau.
4. Ibu Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Dosen Pembimbing skripsi penulis. Beliau dengan kesabarannya mengayomi membuat penulis merasa Beliau sebagai Ibu kedua penulis. Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis haturkan banyak terima kasih.
5. Bapak Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA., dan Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji dalam Ujian Komprehensif skripsi penulis. Atas segala masukan membangunnya selama ujian, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

6. Bapak Saiful, selaku administrasi program studi Hubungan Internasional, yang penulis repotkan selama pendaftaran Ujian Komprehensif, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas segala kebijaksanaannya.
7. *Mamah, Appa (Alm.)*, dan seluruh keluarga penulis yang sangat sabar dalam menunggu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan studi S1 Hubungan Internasional ini. *Insy Alloh*, surga untuk Beliau di akhirat kelak dengan segala kebahagiaannya, begitu pula di dunia.
8. Keluarga Besar Ayah Aji Suyono yang dengan segala upaya mendukung penulis untuk tetap berjuang dan menyelesaikan studi penulis.
9. Terkhusus, Yana Fitri Mawaddatan Warohmah, atas segala kesabaran dan teguran selama ini, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih. *Kehadiranmu, salah satu kesyukuran terbesarku.*
10. Teman terbaik selama ini, Mas Anto, Mbak Tia, dan seluruh keluarga besar Pondok Gunung, tanpa mereka, sulit bagi penulis untuk bangkit. Kemudian keluarga rumpi, Nur Chanifah, Luthfi Baskoroadi, Andi Alfian Pratama, Rani Widya, Rani Nindya K, Nur Diana Izzah, Haekal Yusuf Prabowo, Rahman, juga semua rekan mahasiswa Hubungan Internasional.
11. Keluarga Besar Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang sangat tulus mendukung penulis dalam penyelesaian studi ini.

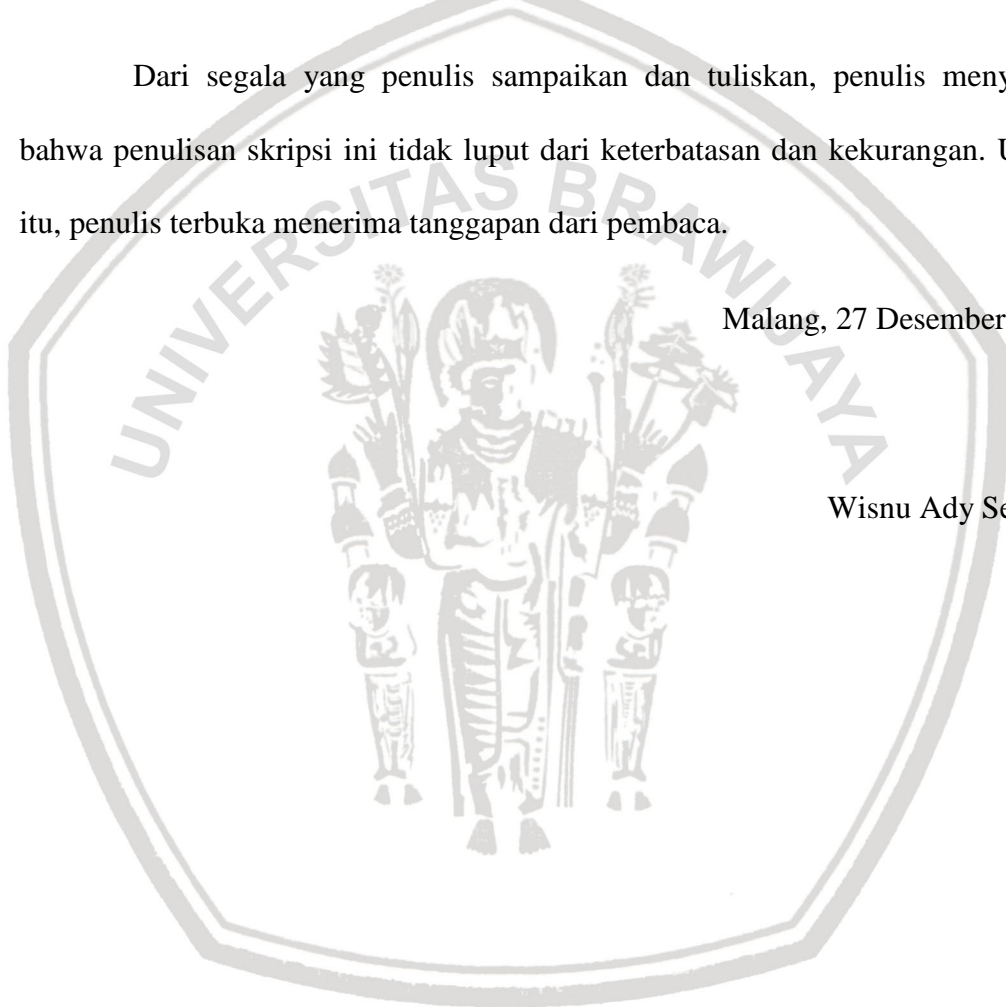
12. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Penulis berharap, semoga hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya hubungan internasional yang berorientasi pada analisis pengambilan keputusan dalam konteks migrasi dan krisis pengungsi.

Dari segala yang penulis sampaikan dan tuliskan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu, penulis terbuka menerima tanggapan dari pembaca.

Malang, 27 Desember 2018

Wisnu Ady Septian



ABSTRAK

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM PENOLAKAN PENGUNGSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO TAHUN 2015-2017

Oleh: Wisnu Ady Septian

Dalam merespon krisis pengungsi di kawasan Eropa, diberlakukan kebijakan skema relokasi dan *resettlement* oleh Dewan Eropa yang berlaku dari September 2015 sampai September 2017. Kebijakan ini dimaksudkan untuk merelokasi dan memukimkan kembali sejumlah pengungsi yang berada di Italia dan Yunani ke negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan darurat tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa di antaranya bahkan sama sekali tidak melakukan relokasi dan *resettlement* pengungsi, Polandia merupakan salah satunya. Perdana Menteri Polandia, Beata Szydlo menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi Polandia untuk menerima satupun pengungsi. Selain itu, Ia menyampaikan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah kepada masyarakatnya, bukan yang lain. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *Foreign Policy Inputs* yang terdapat dalam buku berjudul *World Politics: an Introduction*, karya James N. Rosenau, untuk menganalisis pengambilan keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Pengungsi, Skema Relokasi dan *Resettlement*, Beata Szydlo.

ABSTRACT

ANALYSIS OF POLAND'S DECISION MAKING ON REFUSAL OF REFUGEES DURING BEATA SZYDLO'S GOVERNMENT ADMINISTRATION 2015-2017

By: Wisnu Ady Septian

In response to the crisis of refugees in the European region, a policy of the relocation and resettlement scheme by the European Council was implemented from September 2015 to September 2017. This policy was intended to relocate and resettle a number of refugees residing in Italy and Greece to other EU member countries . The emergency policy is not fully implemented by European Union member countries. Some of them did not even carry out a single refugee relocation and resettlement at all, Poland was one of them. Polish Prime Minister Beata Szydlo stated that there was no possibility for Poland to accept any refugees. In addition, he said that the government's responsibility is to their citizens, not others. In this study, the author will use the theory of Foreign Policy Inputs in the book entitled World Politics: an Introduction, by James N. Rosenau, to analyze Polish decision making in the refusal of refugees during the Beata Szydlo's Government Administration in 2015-2017.

Keywords: *Foreign Policy, Refugees, Relocation and Resettlement Scheme, Beata Szydlo.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	11
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	13
2.1. STUDI TERDAHULU	13
2.2. KERANGKA TEORI.....	18
2.2.1. Kebijakan Luar Negeri.....	18
2.2.2. Teori <i>Foreign Policy Inputs</i>	19
2.3. OPERASIONALISASI KONSEP	26
2.3.1 <i>Systemic Sources</i>	26
2.3.2. <i>Societal and Governmental Sources</i> (Internal)	27
2.3.3. <i>Idiosyncratic Sources</i> (Internal).....	29
2.4. RASIONALISASI PEMILIHAN INPUT	31
2.5. ALUR PEMIKIRAN	33
2.6. HIPOTESIS	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. JENIS PENELITIAN	35
3.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN	35
3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	36

3.4.	TEKNIK ANALISIS DATA	36
3.5.	SISTEMATIKA PENULISAN	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DINAMIKA MIGRASI DI EROPA DAN POLANDIA		38
4.1.	Dinamika Migrasi di Eropa	38
4.2.	Dinamika Migrasi Polandia	45
4.3.	<i>EU Relocation and Resettlement Scheme</i>	49
4.4.	Peran Polandia dalam Menghadapi Krisis Pengungsi	52
BAB V ANALISIS SUMBER-SUMBER EKSTERNAL DAN INTERNAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM PENOLAKAN PENGUNGSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO TAHUN 2015-2017		57
5.1.	<i>Systemic Sources</i> (Sumber Eksternal)	57
5.1.1.	<i>ALLIANCES</i>	57
5.1.2.	FAKTOR SITUASIONAL: EKSTERNAL (KRISIS).....	61
5.2.	<i>Societal and Governmental Sources</i> (Sumber Internal)	64
5.2.1.	<i>CULTURE AND HISTORY</i>	64
5.2.2.	<i>MOODS OF OPINION</i>	72
5.2.3.	STRUKTUR PEMERINTAHAN	77
5.2.4.	AKUNTABILITAS POLITIK	80
5.2.5.	<i>ECONOMIC DEVELOPMENT</i>	86
5.3.	<i>Idiosyncratic Sources</i> (Sumber Internal)	89
5.3.1.	<i>VALUES AND PERSONALITIES OF LEADER</i>	89
5.3.2.	<i>TALENTS AND EXPERIENCES OF LEADER</i>	92
BAB VI PENUTUP		96
DAFTAR PUSTAKA		100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber-sumber Input Kebijakan Luar Negeri	20
Tabel 2.2. Operasionalisasi Konsep	30
Tabel 4.1. Alokasi Kuota Relokasi Pengungsi dari Italia dan Yunani tahun 2015	50
Tabel 5.1. Hasil Pemilihan Umum Parlemen Polandia tahun 2015	78



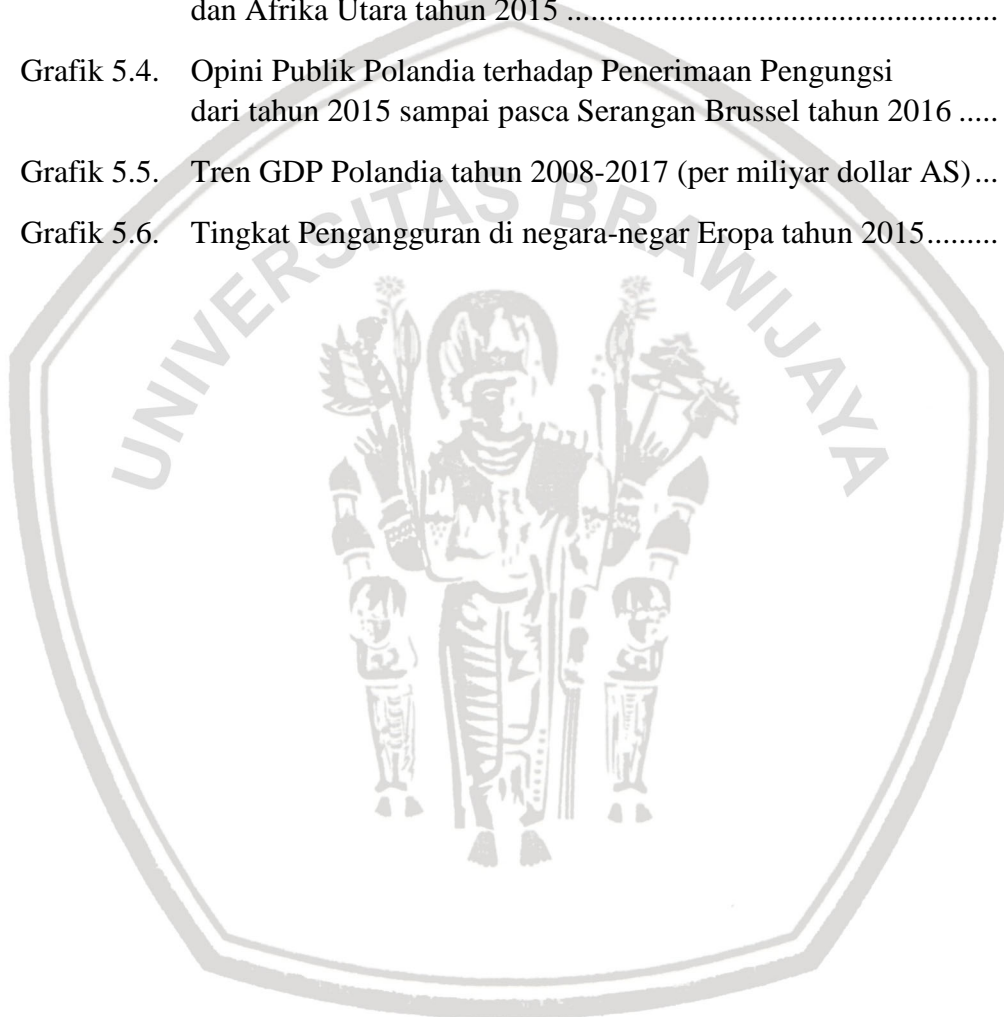
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Pelaksanaan Relokasi dan Resettlement Pengungsi dari Italia dan Yunani ke Negara-negara Anggota Uni Eropa tahun 2015-2017	53
Gambar 5.2.	Peta Perolehan Suara Pemilu Parlemen tahun 2011.....	80
Gambar 5.3.	Peta Perolehan Suara Pemilu Parlemen tahun 2015.....	81



DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1.	Presentase Opini Publik Polandia tentang Penerimaan Pengungsi dari Negara-negara Muslim tahun 2017.....	72
Grafik 5.2.	Presentase Opini Publik Polandia tentang Penolakan Pengungsi dari Negara-negara Muslim dengan Resiko Sanksi Uni Eropa tahun 2017	73
Grafik 5.3.	Opini Publik tentang Justifikasi Penolakan Pengungsi dari Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara tahun 2015	74
Grafik 5.4.	Opini Publik Polandia terhadap Penerimaan Pengungsi dari tahun 2015 sampai pasca Serangan Brussel tahun 2016	75
Grafik 5.5.	Tren GDP Polandia tahun 2008-2017 (per miliar dollar AS)...	86
Grafik 5.6.	Tingkat Pengangguran di negara-negara Eropa tahun 2015.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Migrasi internasional merupakan salah satu isu dalam Hubungan internasional yang timbul seiring dengan peningkatan interaksi antar aktor-aktor hubungan internasional, penipisan kejelasan batas-batas negara, serta kemudahan dalam melakukan migrasi. Selain itu, migrasi internasional salah satunya sebagai bentuk dari pencarian kehidupan lebih baik yang dilakukan masyarakat didorong oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan populasi dunia, peningkatan jumlah negara, revolusi di bidang komunikasi dan transportasi, ataupun terjadinya kekacauan dan pergolakan dunia yang tidak menentu.¹

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa, migrasi internasional didasari adanya dua hal, teritori dan keanggotaan suatu masyarakat pada teritori yang bersangkutan. Dalam hal ini teritori tersebut adalah negara dengan segala batas dan kedaulatannya, sedangkan keanggotaan adalah status warga negara yang tersemat dalam setiap orang tergantung apakah negara tempat ia tinggal menganut pengesahan warga negara dengan asas kelahiran, atau berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Tanpa hal ini baik imigrasi maupun emigrasi tidak akan pernah ada.²

Pertumbuhan migrasi internasional dalam beberapa tahun ini, khususnya yang terjadi di wilayah Eropa, salah satunya disebabkan oleh adanya konflik atau

¹ Brian White, 1997, *Issues in World Politics*, dalam Pengantar Hubungan Internasional, A.A. Banyu Perwita, Yanyan Mochamad Yani, halaman 150.

² James Hampshire, *The Politics of Immigration* (Cambridge, Polity Press, 2013), halaman 4.

perang di negara-negara asal, seperti dari negara-negara kawasan Afrika dan Timur Tengah, khususnya Suriah.³ Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya bahwa migrasi yang di dalamnya terdapat pengungsi sebagai subjek dapat didorong adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan isi dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi⁴, bahwa:

“pengungsi adalah orang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya ia biasa bertempat tinggal, sebagai peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”

Seiring dengan sering terjadinya kebingungan yang ditimbulkan dari terminologi antara pengungsi dan pencari suaka, UNHCR menyampaikan bahwa seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka.⁵

Tahapan berikutnya, pencari suaka tersebut akan diwawancara oleh UNHCR dalam hal ini dibantu oleh penerjemah yang kompeten. Proses tersebut dilakukan untuk menemukan alasan yang kemudian akan digunakan sebagai latar

³ Eurostat, “Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts”, BBC.com, 4 Maret 2017, <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911> (diakses pada 27 Juli 2017).

⁴ Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi, pasal 1A.

⁵ Terminologi Pencari Suaka, UNHCR Indonesia, diakses dari <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> pada 29 Nopember 2018.

belakang atas keputusan antara keputusan dapat atau tidaknya status pengungsi diberikan. Setiap pencari suaka yang permintaan akan perlindungan internasionalnya ditolak, dapat mengajukan banding atas permintaannya tersebut dengan diberikan sebanyak satu kali kesempatan.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang isu yang berkaitan dengan pengungsi, serta kebijakan suatu negara terkait hal tersebut. Penelitian ini didasarkan pada fenomena krisis pengungsi yang terjadi karena luapan arus migrasi di Eropa antara tahun 2015 hingga 2017 dimana Uni Eropa yang dikenal dengan kebijakan imigrasinya yang menghapus pemeriksaan di perbatasan dan menjamin kebebasan bergerak bagi perpindahan penduduk baik lokal maupun asing dari satu negara ke negara lain dalam kawasan Uni Eropa,⁶ dihadapkan dengan gelombang pengungsi yang memasuki wilayah Eropa secara masif.

Krisis tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka (imigran) yang memasuki wilayah negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Yunani. Negara yang berbatasan dengan laut mediterania ini menjadi salah satu gerbang utama pengungsi untuk mencapai wilayah Uni Eropa, di samping Italia.⁷

Permasalahan bagi Uni Eropa yang kemudian muncul yaitu adanya ketidakseimbangan dalam hal pintu kedatangan pengungsi, yaitu Italia dan Yunani sebagai negara dengan mayoritas kedatangan, serta ketidakseimbangan negara

⁶ Humphrey Wangke, "Krisis Migran dan Masa Depan Intergrasi Uni Eropa", *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, No.03/I/P3DI/Februari/2016, halaman 7, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-3-I-P3DI-Februari-2016-4.pdf, (diakses pada 12 April 2017).

⁷ "Krisis Pengungsi makin Resahkan Eropa", *Deutsche Welle*, 22 Januari 2016, <http://p.dw.com/p/1HiA2> (diakses pada 20 Oktober 2016).

tujuan. Sebesar 43% aplikasi suaka masuk ke Jerman dan Swedia.⁸ Selain itu, arus pengungsi memasuki Eropa yang semakin besar, membuat Uni Eropa mengeluarkan kebijakan kuota untuk merelokasi pengungsi dan imigran ke negara-negara anggota Uni Eropa, disesuaikan dengan tingkat ekonomi, tingkat pengangguran, dan jumlah pengungsi yang sudah masuk ke negara tersebut.⁹

Dalam kasus ini, seolah Uni Eropa diuji kembali bagaimana integritas negara anggota ketika jumlah pengungsi dan pencari suaka, khususnya kali ini dari Timur Tengah dan Afrika yang tiba di Eropa mengalami peningkatan yang masif dan tidak terkendali dimana sekitar satu juta pengungsi dan pencari suaka baru memasuki Eropa pada kuartal pertama sampai kedua tahun 2015.¹⁰ Peningkatan drastis dari tahun 2014 yang tercatat sebanyak 431.000 orang, dan sebanyak 80% adalah yang berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan.¹¹

Beberapa negara Eropa Barat seperti Inggris (sebelum Brexit) dan Perancis, meningkatkan level penjagaan dan perlindungan (*to maintain and to protect*) perbatasan untuk mengurangi bahkan mencegah masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria, Slovakia, Rumania, Ceko, dan Bulgaria, untuk mencegah masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara mereka melalui Turki. Berbeda dengan Austria yang membiarkan pengungsi dan pencari suaka melintasi perbatasannya agar dapat menuju Jerman.¹² Keputusan Jerman

⁸ Ibid, halaman 18.

⁹ Kompas, "Warga Eropa Dulu Migran", *Harian Kompas*, 10 September 2015.

¹⁰ Silvia Colombo, "Slouching Toward Ankara: The EU-Turkey Migration Deal", *Council of Councils*, https://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p37825, (diakses pada 15 Oktober 2016).

¹¹ Eurostat, "Asylum Statistics", Op.cit.

¹² Luke Harding, "Refugee crisis: Germany reinstates controls at Austrian border", *The Guardian*, 13 September 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/13/germany-to-close-borders-exit-schengen-emergency-measures> (diakses pada 17 Mei 2016)

yang memberlakukan *Open-door Policy*, pada awal terjadinya krisis sebagai bentuk tanggung jawab atau solidaritas kepada sesama anggota Uni Eropa membuat lonjakan pengungsi meningkat tajam. Sampai kemudian, Jerman juga mencapai batasnya dan memberlakukan pengawasan dan pengetatan perbatasannya dengan Austria.¹³

Dalam menanggapi permasalahan ini, merujuk pasal 78 ayat 3 *Treaty on the Functioning the European Union* (TFEU), Dewan Eropa, mengacu pada proposal dari Komisi Eropa, serta pasca konsultasi dengan Parlemen Eropa, dimungkinkan untuk melakukan langkah-langkah untuk kebaikan negara anggota yang bersangkutan, ketika negara tersebut, dihadapkan dengan situasi darurat, seperti luapan migrasi mendadak dari warga negara ketiga.¹⁴

Selanjutnya, menurut pasal 80, kebijakan-kebijakan *Union* dalam kaitannya dengan pemeriksaan perbatasan, suaka dan imigrasi, serta implementasinya, harus dikelola dengan prinsip solidaritas dan pembagian tanggung jawab yang adil di antara negara anggota. Kemudian, tindakan-tindakan *Union* yang diadopsi dalam bidang ini harus mengandung tindakan yang tepat untuk menghasilkan dampak yang sejalan dengan prinsip dimaksud.¹⁵

Maka dari itu, Uni Eropa memberlakukan kebijakan skema relokasi dan *resettlement* yang dimulai pada September 2015. Skema relokasi dan *resettlement* ini dibentuk pada bulan September 2015 di mana sebanyak 160.000 pengungsi

¹³ Andrea Shalal, "Germany's Schaeuble admits 'mistakes' in refugee policy", *Reuters*, 29 Januari 2017, <http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-idUSKBN15D0CO> (diakses pada 19 Juni 2017).

¹⁴ Council of the European Union, *Council Decision establishing provisional measures in the area of international protection for benefit of Italy and Greece*. Legal Acts and Other Instruments, Brusel 22 September 2015, halaman 2.

¹⁵ Ibid.

yang berada Italia dan Yunani (dan jika relevan dari negara anggota lainnya) ke negara-negara anggota Uni Eropa sampai September 2017.¹⁶

Di sisi lain, Polandia dan juga negara-negara yang menolak menerapkan skema relokasi Uni Eropa serta tidak mau menerima pengungsi, dihadapkan pada sanksi yang akan dijatuhkan oleh Uni Eropa. Sanksi tersebut mengharuskan negara yang menolak pengungsi membayar sebanyak 250 ribu Euro per pengungsi yang mereka tolak. Uang tersebut akan disalurkan ke negara-negara yang pada saat itu menampung pengungsi dalam jumlah besar. Berdasarkan kuota yang ditetapkan, Polandia diharuskan menerima sekitar 6.500 pengungsi. Dengan demikian, jika Polandia tidak mau menerima satu pun pengungsi, maka Polandia harus membayar hingga 1.6 miliar Euro untuk bantuan kemanusiaan.¹⁷

Dikarenakan penelitian ini akan membahas mengenai isu migrasi dan kebijakan luar negeri, maka penulis akan menyampaikan keterkaitan antara dua hal tersebut. Hal ini tidak terlepas dari penyebab terjadinya migrasi internasional tersebut, seperti perang, masalah ekonomi, perpecahan atau keretakan antara Utara-Selatan, ras dan etnik.¹⁸ Michael Teitenbaum mengungkapkan bahwa respon negara terhadap fenomena migrasi internasional seperti pengetatan prosedur pencari suaka, pengurangan imigran gelap, atau pemulangan imigran dan

¹⁶ European Commission - Press Release, *Relocation and Resettlement: EU Member States urgently need to deliver*, Brussels 16 Maret 2016, diakses dari http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-829_en.htm pada 28 Agustus 2018.

¹⁷ Denny Armandhanu, "Polandia Membangkang Uni Eropa, Tolak Terima Pengungsi", *CNN Indonesia*, 10 Mei 2016, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi/> (diakses pada 17 Mei 2017)

¹⁸ Michael Teitenbaum, "Immigration, Refugees, and Foreign Policy", *International Organizations*, Vol. 38, No. 3 (Summer, 1984), halaman 429.

menolak memberikan status suaka, merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan luar negeri.¹⁹

Hubungan antara perpindahan migrasi dengan kebijakan luar negeri muncul dalam empat dimensi. *Pertama*, kebijakan luar negeri seringkali atau tidak sengaja menstimulasi terjadinya migrasi internasional, seperti kedatangan penduduk dalam jumlah besar, dalam kasus intervensi militer atau politik luar negeri, atau respon internal maupun eksternal terhadap intervensi. Kebijakan luar negeri dimungkinkan untuk memfasilitasi atau membatasi gelombang pengungsi. *Kedua*, baik negara pengirim maupun penerima, migrasi massa dimungkinkan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri lawan. *Ketiga*, jumlah pengungsi, imigran, maupun diaspora di negara penerima mempengaruhi kebijakan luar negerinya terhadap negara pengirim. Selain itu, negara pengirim mencoba menggerakkan populasi ekspatriat mereka demi mencapai tujuan kebijakan luar negerinya seperti bergabung dengan organisasi regional. *Terakhir*, beberapa prioritas kebijakan luar negeri, seperti isu keamanan dan perbatasan, dapat membentuk kebijakan terkait imigrasi atau pencari suaka.²⁰

Di sisi lain, serangkaian serangan teror yang terjadi di beberapa kota di negara-negara anggota Uni Eropa seolah menunjukkan bahwa terorisme masuk ke wilayah Uni Eropa dengan bersembunyi di balik arus pengungsi. Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran masyarakat di Polandia tentang peningkatan kemungkinan terorisme di Polandia.²¹ Berdasarkan survei Pew Research Center,

¹⁹ Michel Teitenbaum 1984 dan Castles 2014 dalam N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek, "The International Migration and Foreign Policy Nexus: the Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey," *Migration Letters*, Volume 12, No: 3 (September 2015): halaman 195.

²⁰ Michael Teitenbaum, "Immigration, Refugees, and Foreign Policy", *Op.cit.*, halaman 433-441

²¹ Pascal S Bin Saju, "Mayoritas Orang Eropa Percaya Imigrasi Tingkatkan Ancaman Teror", *Kompas.com*, 13 Juli 2016,

di antara 10 negara Uni Eropa yang disurvei, Polandia menempati urutan teratas di antara negara-negara yang menganggap pengungsi yang berasal dari Suriah dan Iraq sebagai ancaman terhadap negaranya. Sebanyak 73% warga Polandia beranggapan demikian, disusul oleh Hungaria dan Yunani dengan 69%. Selanjutnya, Polandia juga masuk ke dalam enam besar negara-negara yang tidak puas atau tidak setuju dengan bagaimana Uni Eropa menangani krisis migrasi yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan presentase sebanyak 71%. Sedangkan Yunani berada di urutan teratas dengan presentase 94%.²²

Setelah serangan yang terjadi di Brussel, Polandia menegaskan tidak akan menerima pengungsi atau pencari suaka dalam jumlah berapapun. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo yang baru menjabat pada akhir tahun 2015. Polandia menjadi negara Uni Eropa pertama yang melakukan hal itu setelah serangan yang menewaskan 34 orang dan melukai 270 orang, termasuk di antaranya tiga orang berkewarganegaraan Polandia.²³

Masuknya pengungsi, khususnya yang berlatar belakang Muslim dianggap akan menjadi masalah bagi masyarakat Polandia yang homogen. Polandia merupakan negara paling homogen di antara negara-negara anggota Uni Eropa, terlebih kaitan antara warga Polandia dengan Katholik Roma. Polandia juga beranggapan bahwa para pengungsi dengan usia yang relatif muda seharusnya tidak melakukan migrasi, melainkan ikut berperang untuk kebebasan

<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/08465581/mayoritas.orang.eropa.percaya.i.migrasi.tingkatkan.ancaman.teror> (diakses pada 25 Agustus 2016).

²² Jacob Poushter, "European opinions of the refugee crisis in 5 charts", *Pew Research Center*, 16 September 2016, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/> (diakses pada 20 Juli 2017).

²³ Ervan Hardoko, "Pasca-bom Brussels, Polandia Tolak Tampung Pengungsi", *Kompas.com*, 24 Maret 2016, <http://internasional.kompas.com/read/2016/03/24/15084971/Pasca-bom.Brussels.Polandia.Tolak.Tampung.Pengungsi> (diakses pada 25 Agustus 2016).

mereka.²⁴ Padahal, dalam Pasal 3 Konvensi 1951 tentang Non-Diskriminasi, disebutkan bahwa negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau negara asal, dan pasal 4 tentang Agama, menyebutkan Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya perlakuan yang setidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan anak-anak mereka.²⁵ Seperti diketahui, Polandia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi pada tahun 1991.²⁶

Dari 100.000 populasi, Polandia hanya mendapat sebanyak 32 pengajuan aplikasi suaka pada kuartal pertama tahun 2015. Hal ini berbanding terbalik dengan Hungaria dengan 1.799 aplikasi, disusul oleh Swedia dengan 1.667 aplikasi. Sedangkan rata-rata Uni Eropa berada dikisaran 260 aplikasi.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Polandia bahkan tidak mencapai rata-rata Uni Eropa dalam mendapat pengajuan aplikasi suaka. Penulis melihat hal tersebut sebagai anomali, dimana Polandia hanya mendapat sedikit pengajuan aplikasi suaka dibandingkan dengan negara lain, tapi memberlakukan kebijakan penolakan terhadap pengungsi. Hungaria memang menolak masuknya imigran dan menurut penulis itu wajar jika melihat banyaknya aplikasi suaka yang masuk ke Hungaria. Di sisi lain, Swedia

²⁴ Jen Cienski, "Why Poland doesn't want refugees", *Politico*, 26 Mei 2017, <http://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/> (diakses pada 22 Juli 2017).

²⁵ Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi, Pasal 3 tentang Non-Diskriminasi dan Pasal 4 tentang Agama.

²⁶ UNHCR, "States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol".

²⁷ Eurostat, "Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts", BBC.com, 4 Maret 2017, <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911> (diakses pada 27 Juli 2017).

yang juga banyak mendapat pengajuan aplikasi suaka, cenderung menyetujui skema relokasi Uni Eropa dan siap menerima pengungsi.

Selain itu, Polandia mengungkapkan bahwa negara mereka tidak ingin didikte oleh pihak lain tentang kebijakan yang berkaitan dengan masyarakatnya. Bagi Polandia, prioritas atau tanggung jawab keamanan dan keselamatan adalah kepada warga negaranya.²⁸

Menurut penulis, urgensi dalam penelitian ini terletak pada isu yang dibahas yaitu krisis migrasi. Uni Eropa yang dihadapkan dengan krisis migrasi terbesar setelah perang dunia ke dua dituntut untuk melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan skema relokasi untuk menyalurkan pengungsi dari negara-negara yang terdampak ke negara-negara anggota lainnya disesuaikan dengan tingkat ekonomi, tingkat pengangguran, dan jumlah pengungsi yang sudah masuk ke negara tersebut.²⁹ Namun demikian, tidak semua negara menyepakati kebijakan ini, salah satunya Polandia. Bersama dengan aliansinya yaitu *Visegrad Group* yang beranggotakan Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, dan Polandia, menentang kebijakan skema relokasi tersebut. Alasan utama Polandia menolak masuknya pengungsi ke negaranya adalah keamanan. Sebagaimana diketahui, terjadi serangkaian serangan teror di beberapa kota di negara anggota Uni Eropa yang diduga melibatkan pengungsi sebagai kendaraan masuknya teroris. Selain itu, isu kemanusiaan yang mengiringi krisis migrasi ini patut mendapat perhatian dari banyak pihak, mengingat banyaknya pengungsi yang tewas di tengah perjalanan menuju negara-negara anggota Uni Eropa, baik di lautan saat menyeberang dengan kapal,

²⁸ Jen Cienski, "Why Poland doesn't want refugees", Op, cit.

²⁹ Kompas, "Warga Eropa Dulu Migran", *Harian Kompas*, 10 September 2015.

maupun perjalanan darat, serta kelayakan kehidupan yang diterima sepanjang perjalanan atau saat menunggu diterimanya aplikasi suaka dari negara yang dituju.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar yang penulis paparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Mengapa Polandia memutuskan untuk menolak pengungsi pada masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi pada masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan sarana untuk membantu penstudi Hubungan Internasional agar lebih memahami teori *Foreign Policy Inputs* milik James N. Rosenau yang menjelaskan bagaimana perumusan pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada sumber-sumber kebijakan, baik lingkup internal, maupun eksternal. Lebih jelasnya akan penulis paparkan di Bab berikutnya.

Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dalam memahami konteks atau relevansi konsep tersebut pada kajian analisis kebijakan luar negeri dalam Hubungan Internasional.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan ide maupun pemikiran, baik berupa referensi maupun masukan bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan refleksi berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi program di lapangan. Hal tersebut, terutama, dalam pengambilan kebijakan luar negeri dalam konteks migrasi, dan isu-isu yang berkaitan dengannya.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. STUDI TERDAHULU

Adanya studi terdahulu, dimaksudkan untuk memberikan referensi terkait penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelum penelitian yang penulis lakukan. Keserupaan tersebut dapat berkaitan dengan tema penelitian, ruang lingkup penelitian, ataupun variabelnya. Dengan demikian, penulis mendapatkan gambaran bangunan keilmuan yang telah diletakkan oleh peneliti sebelumnya dengan topik serupa. Hal tersebut juga membantu penulis memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda, bersifat pembaruan dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Dalam hal ini, penulis membahas studi terdahulu yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini, baik dari segi tema penelitian, judul penelitian atau variabel yang digunakan.

Studi terdahulu pertama berjudul *The International Migration and Foreign Policy Nexus: the Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey*, yang ditulis oleh N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek.³⁰ Tulisan ini menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait krisis *refugees* Suriah yang sebelumnya memberlakukan *Open Door Policy*, menjadi *Non-arrivals Policy*.³¹

³⁰ N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek, "The International Migration and Foreign Policy Nexus: The Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey," *Migration Letters*, Volume 12, No: 3 (September 2015): halaman 193-208.

³¹ Ibid, halaman 205.

Kebijakan Turki dalam merespon krisis pengungsi dari Suriah merefleksikan pergeseran yang signifikan dari tren global secara umum, juga kebijakan Turki sebelumnya terkait aliran pengungsi dari Kurdis Irak pada tahun 1998 dan 1991. Terhadap pengungsi Suriah, Turki mengadopsi kebijakan *open door*, mengesampingkan sekuritisasi atas pergerakan pengungsi, serta tidak mengajukan pembagian beban dalam artian meminta bantuan terhadap negara atau lembaga lain untuk menangani krisis pengungsi ini, dalam waktu yang cukup lama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kapabilitas *soft power* yang dimiliki Turki. Selain itu, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, yaitu ‘bertindak seperti negara yang *powerfull* di kawasannya’, serta membangun reputasi di mata internasional sebagai aktor yang sangat penting yang dapat berkontribusi dalam melaksanakan solusi terkait masalah kemanusiaan dan politik.³²

Dalam menghadapi konflik yang terjadi di Suriah yang mengakibatkan perpindahan warga Suriah untuk menyelamatkan diri dari konflik, Turki memberlakukan kebijakan *open door* tanpa syarat. Pada awalnya, warga Suriah yang memasuki wilayah Turki dianggap sebagai “tamu” daripada pengungsi legal, walaupun tidak ada istilah dalam hukum *refugee* internasional. Namun, karena semakin bertambahnya jumlah pengungsi yang masuk, Turki memberlakukan status *Temporary Protection* pada Oktober 2011, sebagaimana yang dilakukan Turki saat merespon krisis pengungsi Irak pada 1991. Peraturan ini membuat

³² Ibid, halaman 194.

pengungsi Suriah memperoleh hak suaka sementara, sampai mereka dipindahkan ke negara ketiga secara aman.³³

Perubahan respon Turki terhadap krisis pengungsi Suriah kemudian terjadi dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, pemerintah Turki mulai mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan dalam negeri Suriah tanpa adanya izin dari pemerintah Suriah. *Kedua*, bantuan yang diberikan Turki kepada oposisi pemerintah Suriah terpecah belah, sehingga seolah tidak tepat sasaran. *Ketiga*, perhatian Turki pada perbatasannya dengan Suriah meningkat setelah terjadinya beberapa insiden mematikan.³⁴

Dari pemaparan tentang studi terdahulu di atas, penulis menemukan persamaan dengan penelitian yang penulis kerjakan, yaitu isu yang menjadi kajian utama penulis berupa studi tentang kebijakan luar negeri, dan krisis pengungsi. Perbedaannya, penulis mengambil isu yang terjadi di Eropa, tepatnya Polandia yang mengeluarkan kebijakan untuk menutup diri dari masuknya pengungsi muslim ke negaranya pada masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2016, sedangkan studi terdahulu yang penulis gunakan, membahas tentang respon Turki terhadap krisis pengungsi dari Suriah.

Kontribusi yang bisa penulis ajukan dari penelitian ini adalah sebagai pembandingan antara kebijakan Turki dan Polandia dalam merespon krisis pengungsi yang terjadi.

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan merupakan sebuah tesis berjudul Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra-

³³ Ibid, halaman 202.

³⁴ Ibid, halaman 204.

Terorisme pasca Serangan Bom Bali I karya Heggy Kaerens.³⁵ Dalam tesis ini, Kaerens menggunakan Model Adaptif dan *Foreign Policy Inputs* James N. Rosenau, salah satunya akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Disampaikan dalam tesis ini bahwa terjadi perubahan arah kebijakan Australia dalam bidang keamanan, dari bersifat *hard* ke *soft approach*. Hal ini dikukuhkan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding Combating International Terrorism* pada tahun 2002 oleh kedua negara sebagai langkah awal penjagaan stabilitas keamanan kawasan, khususnya dari serangan terorisme.³⁶

Dalam menjelaskan kebijakan luar negeri Australia dalam rentang waktu tersebut, Kaerens yang menggunakan model adaptif dan sumber masukan kebijakan luar negeri James N. Rosenau mengemukakan bahwa, sumber yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut diperoleh dari pemerintahan yang berkuasa, Perdana Menteri sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Australia, serta opini publik Australia terkait isu tersebut. Sedangkan, kedekatan Australia dengan Amerika Serikat dan juga perhatian dunia, khususnya PBB terhadap isu HAM dinilai menjadi sumber eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia tersebut.³⁷

Persamaan yang dapat dimunculkan antara tesis Kaerens dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan variabel-variabel yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, yaitu variabel-variabel yang terdapat pada sumber masukan kebijakan luar negeri James N. Rosenau. Walaupun demikian,

³⁵ Heggy Kaerens, *Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra-Terrorisme pasca Serangan Bom Bali I*, Tesis, 2012, Universitas Indonesia, Jakarta.

³⁶ Ibid, halaman 96.

³⁷ Ibid, halaman 102.

dikarenakan perbedaan isu, kebijakan, dan negara yang diteliti, tidak menutup kemungkinan penulis akan menggunakan beberapa variabel yang dinilai lebih sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dicontohkan pula oleh Kaerens yang menggunakan beberapa variabel yang relevan digunakan dalam tesisnya. Sehingga dari tesis Kaerens, penulis mendapatkan justifikasi penggunaan *cluster of inputs* seperti yang disampaikan James N. Rosenau.

Selanjutnya, untuk lebih meyakinkan penggunaan variabel-variabel yang penulis gunakan dari sumber masukan kebijakan luar negeri, penulis menggunakan studi terdahulu ketiga yang berjudul *The Politics of Immigration*, karya James Hampshire.³⁸ Dalam bagian dua buku ini, yaitu *The Politics of Closure*, Hampshire membahas mengapa negara melakukan penutupan dirinya terhadap pengungsi.³⁹

Hampshire mengungkapkan bahwa terjadi kekhawatiran dari negara-negara yang menolak pengungsi akan adanya ancaman terhadap ras, bangsa dengan masuknya imigran. Hal ini dicontohkan oleh Hampshire dengan mengangkat isu bagaimana pada abad ke 19, imigran yang datang ke Amerika Serikat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari warga yang notabene generasi ke dua imigran Sentimen ini terjadi kepada imigran-imigran yang berasal dari kawasan Eropa Timur dan Selatan, serta China. Pada saat itu, terdapat semacam slogan yang sarannya adalah '*keeping America American*'.⁴⁰

Selain itu, opini publik, partai yang berkuasa di suatu negara, serta gelombang baru imigran merupakan alasan-alasan mengapa suatu negara menolak

³⁸ James Hampshire, *The Politics of Immigration* (Cambridge, Polity Press, 2013).

³⁹ Ibid, halaman 16.

⁴⁰ Ibid

untuk menerima pengungsi, terlebih setelah kejadian 9/11.⁴¹ Momen yang menurut penulis menguatkan sentimen terhadap Muslim. Misalnya, pernyataan Geert Wilders, pemimpin *Dutch Party of Freedom*, partai sayap kanan di Belanda;

“if we do not stop Islamification now, Eurabia and Netherabia will just be a matter of time . . . We are heading for the end of European and Dutch civilisation as we know it . . . Dutch citizens . . . have had enough of burkas, headcarves, the ritual slaughter of animals, so-called honour revenge, blaring minarets, female circumtion, hymen restoration operations, abuse of homosexuals, Turkish and Arabic on the buses and trains as well as on town hall leaflets.

Demikian studi terdahulu penulis gunakan sebagai bahan perbandingan, berupa persamaan maupun perbedaan antara penelitian kami, serta kontribusi, baik dari penelitian ini kepada studi terdahulu tersebut, maupun sebaliknya. Maka dari itu, penulis meyakini bahwa studi-studi terdahulu tersebut dapat membantu penulis untuk mengarahkan penelitian ini.

2.2. KERANGKA TEORI

2.2.1. Kebijakan Luar Negeri

Untuk mencapai tujuan spesifik negara atau kepentingan nasional, para pembuat kebijakan dalam suatu negara menyusun strategi atau rencana tindakan dalam menghadapi negara lain, maupun unit politik internasional lainnya. Hal ini dikenal dengan kebijakan luar negeri.⁴² Rosenau, mengartikan kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.

⁴¹ Ibid, halaman 32.

⁴² Jack C Plano dan Roy Olton, dalam DR. A.A. Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2005), halaman 49.

Selain itu, kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.⁴³

Hal senada juga dikemukakan oleh K.J. Holsti bahwa lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta memperhatikan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.⁴⁴

Kemudian, Rosenau menambahkan bahwa pengkajian kebijakan luar negeri merupakan ruang yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*), dan kebutuhan eksternal (*external needs*), seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.⁴⁵ Dengan demikian, seperti penulis sampaikan sebelumnya, keputusan penolakan pengungsi ke suatu negara sebagai bagian dari perumusan kebijakan luar negeri relevan adanya dengan justifikasi kebijakan tersebut ditujukan untuk memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara, dari pengungsi yang dianggap membawa ancaman terhadap beberapa hal tersebut oleh Polandia.

2.2.2. Teori *Foreign Policy Inputs*

Rosenau membuat suatu pengelompokan faktor-faktor yang berpengaruh atau menentukan rencana dan pilihan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, atau

⁴³ James N. Rosenau, dalam DR. A.A. Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, Ibid.

⁴⁴ K.J. Holsti, 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Dalam DR. A.A. Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2005), Ibid, halaman.50.

⁴⁵ Ibid, halaman, 49

disebut sebagai sumber utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pengelompokan tersebut di kategorikan ke dalam *time continu* dan *systemic aggregation continu*. *Time Continu* meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat ajeg, berlaku terus menerus, serta tetap (*sources that tend to change slowly*), dan sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek (*short-term fluctuations*), dan sumber-sumber yang dapat berubah relatif cepat (*sources that tend to undergo rapid change*). Sedangkan systemic agregation continu menunjukan posisi sumber-sumber itu memberikan pengaruh.⁴⁶

Tabel 2.1.
Sumber-sumber Input Kebijakan Luar Negeri

Systemic aggregation continuum	Time Continuum		
	Sources that tend to change slowly		Sources that tend to undergo rapid change
Systemic sources	Great power structure Alliance	Size Geography	Situational factors: external Issues areas Crisis
Societal sources	Culture and history	Economic Development Social structure Moods of Opinion	Situational factors: internal
Governmental sources		Political accountability Governmental structure	
Idiosyncretic sources			Values, talents, experiences, and personalities of leaders

Sumber: James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, halaman 18.

Berikut penjelasan dari tabel sumber-sumber input kebijakan luar negeri.

1. *Systemic sources*, merupakan input yang berasal dari lingkungan eksternal. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antara negara-negara besar (*great power structure*), pola aliansi (*alliance*) yang

⁴⁶ James N. Rosenau, Keneth W. Thompson, dan Gavin Boyd, op.cit., halaman 18.

terbentuk antara negara-negara, dan faktor situasional eksternal (*situational factors: external*) berupa isu area atau krisis.

2. *Societal sources*, merupakan input yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini meliputi faktor kebudayaan dan sejarah (*culture and history*), pembangunan ekonomi (*economic development*), struktur sosial (*social structure*), perubahan opini publik (*moods of opinion*), dan faktor situasional internal (*situational factors: internal*)
3. *Governmental sources*, merupakan input yang juga berasal dari lingkungan internal. Sumber ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik (*political accountability*) seperti pemilu, kompetisi partai, dan tingkat kemampuan pembuat keputusan dalam merespon terhadap kondisi eksternal, dan struktur pemerintahan (*governmental structure*).
4. *Idiosyncratic sources*, merupakan input dari lingkungan yang melihat nilai (*values*), bakat (*talents*), pengalaman (*experience*), dan kepribadian (*personalities*) elit politik yang dapat mempengaruhi persepsi, perhitungan, dan perilaku pemimpin.

Penjelasan mengenai sumber-sumber input kebijakan luar negeri, penulis jabarkan sebagai berikut.

1. *Size*

Dalam tabel sumber-sumber input kebijakan luar negeri di atas, faktor *size* (ukuran) berada di antara *systemic* dan *societal source*. Ukuran di sini didefinisikan sebagai sumber daya manusia. Selain itu, *size* dapat mendasari cara pandang masyarakat dalam melihat peran negaranya pada aktivitas internasional

maupun upaya realisasi tujuan. Pada *systemic cluster*, ukuran dipakai untuk melihat peran (*role*) negara dalam politik dunia, dan *self-images* yang di bangun sebagai perbandingan dengan aktor-aktor internasional lainnya.⁴⁷

2. *Geography*

Dalam tabel di atas, faktor geografi terletak di antara *systemic* dan *societal cluster*. Selain itu, sama halnya dengan faktor *size*, geografi juga merupakan faktor yang sulit mengalami perubahan. Faktor ini berkaitan dengan batas-batas negara, akses terhadap lautan, serta bagaimana kondisi lahan, relief, dan iklim di suatu negara. Hal-hal tersebut menurut Rosenau, berperan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri.⁴⁸

3. *Economic Development*

Untuk melihat faktor pembangunan ekonomi sebagai variabel dalam sumber-sumber input kebijakan luar negeri, dapat dilihat melalui alokasi *Gross National Product* (GNP) pada kepentingan-kepentingan luar negeri suatu negara, seperti militer, bantuan ekonomi, maupun hal-hal yang berkaitan dengan isu diplomatik.⁴⁹ Pembangunan ekonomi dalam tabel 2.2 terletak di antara sumber yang mengalami perubahan cepat, dan lambat. Namun, faktor ini lebih dekat kepada sumber yang cenderung perubahannya lambat.

4. *Culture and History*

Tradisi, norma, nilai yang sangat dijunjung tinggi berdasar sejarah yang terdapat pada suatu negara, meempengaruhi pembuatan kebijakan luar negerinya. Semakin penduduk dipersatukan oleh budaya, pengalaman sejarah yang sama,

⁴⁷ James N. Rosenau, Keneth W. Thompson, dan Gavin Boyd, op.cit., halaman 19

⁴⁸ Ibid, halaman 19-20.

⁴⁹ Ibid, halaman 20-21.

semakin jelas dan tegas tujuan kolektif yang dimiliki. Dengan demikian, perilaku kebijakan luar negerinya akan lebih efektif. Penulis memahami bahwa budaya dalam suatu masyarakat dibentuk dalam waktu yang lama. Di samping itu, sejarah baik itu sejarah individu terlebih negara, merupakan hal yang tidak akan dapat berubah, dikarenakan sejarah merupakan kejadian yang terjadi di masa lampau.⁵⁰

5. *Great Power Structure*

Struktur hubungan antara negara-negara besar adalah jumlah negara yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana distribusi kapabilitas di antara negara-negara tersebut dalam sistem global.⁵¹ Sumber ini terletak di antara sumber yang perubahannya lambat dan cepat.

6. *Alliance*

Ketika suatu negara bergabung ke dalam suatu aliansi, terdapat pengaruh dari aliansi tersebut terhadap kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan, terdapat kepentingan-kepentingan yang ada dalam aliansi tersebut, yang biasanya ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Di samping itu, aliansi dibentuk dikarenakan adanya kesamaan pandangan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai.⁵²

7. *Technology*

Rosenau menempatkan faktor teknologi di antara sumber sosial dan sistemik, menunjukan bahwa perubahan teknologi dapat terjadi baik di lingkungan eksternal, maupun internal, seperti dalam bidang militer, ekonomi, transportasi, informasi, dan komunikasi. Dari segi kecepatan berubahnya, teknologi terletak di antara sumber-sumber yang cenderung cepat dan lambat mengalami perubahan.⁵³

⁵⁰ Ibid, halaman 21.

⁵¹ Ibid, halaman 22-23.

⁵² Ibid, halaman 23.

⁵³ Ibid, halaman 23-24.

8. *Social Structure*

Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri yang dihasilkan akan menjadi beragam dengan semakin banyak kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Variabel ini berkaitan dengan kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu dalam mempengaruhi pembuat kebijakan.⁵⁴

9. *Moods of Opinion*

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, opini publik berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan suatu kebijakan, karena dampak dari kebijakan yang diambil juga akan dirasakan oleh masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa opini publik cenderung mengikuti pembungkaman oleh pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.⁵⁵

10. *Political Accountability*

Akuntabilitas politik suatu negara dapat dilihat melalui pemilihan umum, kompetisi partai, dan pengawasan legislatif negara tersebut. Semakin terbuka sistem politik suatu negara, kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya semakin kompleks. Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang semakin banyak dari kepentingan masyarakat yang beragam. Sedangkan di negara dengan sistem politik tertutup, tuntutan masyarakat dapat diabaikan dalam pengambilan kebijakan.⁵⁶

11. *Governmental Structure*

⁵⁴ Ibid, halaman 24.

⁵⁵ Ibid, halaman 25

⁵⁶ Ibid, halaman 25.

Faktor ini melihat bentuk pemerintahan dari suatu negara, antara terpusat (*centralized*), otoriter (*authoritharian*), atau desentralisasi (*decentralized*). Pada pemerintahan yang demokratis, perumusan kebijakan luar negeri cenderung lebih kompleks karena banyak faktor maupun kepentingan dalam pembuatannya. Berbeda dengan pemerintahan otoriter yang cenderung lebih mudah mengatur kebijakan luar negerinya atas dasar tuntutan kepatuhan dari pembuat kebijakan. Selain itu, faktor lain yang harus diperhatikan adalah sistem pemerintahan negara tersebut, apakah presidensial atau parlementer. Selanjutnya sistem partai, apakah satu partai, dua partai, atau multipartai.⁵⁷

12. *Situasional Factors: External*

Terdapat dua aspek yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana faktor ini sebagai input kebijakan luar negeri. *Pertama, issue area* (isu area). Hal ini berkaitan dengan isu diplomatik, militer, budaya, atau ekonomi. *Kedua, crisis* (krisis). Hal ini berkaitan dengan adanya ancaman dari lingkungan eksternal yang memberikan waktu terbatas untuk mengambil suatu keputusan.⁵⁸

13. *Situational Factors: Internal*

Faktor ini memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri suatu negara seperti melalui skandal politik, demonstrasi lokal, hasil pemilihan umum, serta konflik wilayah.⁵⁹

14. *The Value, Talent, Experience, and Personalities of Leader*

Peranan pemimpin suatu negara dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan luar negerinya dapat dilihat melalui nilai pemimpin tersebut tentang sistem internasional, tujuannya dalam memimpin negara, pengalaman-

⁵⁷ Ibid, halaman, 26.

⁵⁸ Ibid, halaman 27.

⁵⁹ Ibid, halaman 28.

pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, serta latar belakang dari pemimpin tersebut. Perubahan pada faktor ini juga cepat mengikuti setiap pergantian pemimpin dalam negara tersebut, dikarenakan setiap pemimpin yang satu dengan lainnya atau pengganti dengan pendahulunya memiliki nilai, latar belakang, pengalaman, yang berbeda pula.⁶⁰

2.3. OPERASIONALISASI KONSEP

Dalam operasionalisasi konsep ini, faktor-faktor yang penulis operasionalisasikan adalah faktor-faktor yang menurut penulis relevan, paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan mengapa Polandia memutuskan untuk menolak pengungsi masa pemeritahan Beat Szydlo tahun 2015-2017.

2.3.1 *Systemic Sources*

Systemic sources mengacu pada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua faktor atau variabel dalam sumber eksternal yang penulis nilai relevan untuk menjelaskan keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia pada masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Variabel-variabel tersebut diantaranya, *Alliances* dan Faktor Situasional Eksternal (Krisis).

1. *Alliances* (Aliansi).

Dalam faktor ini, penulis akan menjelaskan pengaruh dari aliansi yang diikuti oleh Polandia yaitu *Visegrad Group* yang terdiri dari Ceko, Slovakia, Hungaria, dan Polandia.⁶¹ Aliansi ini menolak kebijakan Uni Eropa untuk

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Visegrad Group, www.visegradgrup.eu (diakses pada 25 Agustus 2017).

merelokasi pengungsi ke negara-negara anggota Uni Eropa sebagai upaya mengatasi krisis pengungsi di Eropa.⁶²

2. *Situational Factors: External (Krisis).*

Area isu sebagai indikator faktor situasional eksternal penulis lihat pada isu kebijakan yang berkaitan dengan migrasi masal yang terjadi di Eropa yang mengharuskan Uni Eropa bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Polandia merupakan salah satu negara yang aktif menyuarakan untuk tidak menerima pengungsi, walaupun pada tahun 2015, Polandia bersedia menampung pengungsi sesuai dengan kebijakan Uni Eropa. Indikator ini diperjelas dengan menjelaskan krisis yang terjadi di kawasan Uni Eropa kaitannya dengan keamanan. Penulis melihat keputusan Polandia menolak pengungsi dikarenakan jumlah pengungsi yang semakin tinggi dengan berbagai isu di dalamnya, serta serangkaian serangan teror yang Polandia duga dilakukan oleh teroris yang masuk bersama pengungsi.

2.3.2. *Societal and Governmental Sources (Internal)*

1. *Culture and History.*

Hal ini berkaitan dengan nilai, norma, sejarah, serta tradisi yang dijunjung masyarakat Polandia yang dimungkinkan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Polandia. Beberapa diantaranya adalah konstruksi identitas Polandia sebagai pelindung atau Benteng Eropa dari pengaruh nilai-nilai asing dari luar kawasan.

2. *Moods of Opinion (Opini Publik).*

⁶² Radko Hokovský, "How migrants brought Central Europe Together", *POLITICO.eu*, 7 Februari 2017, <http://www.politico.eu/article/how-migrants-brought-central-europe-together-visegrad-group-orban-poland/> (diakses pada 25 Agustus 2016).

Penulis akan melihat opini publik Polandia terkait krisis pengungsi yang terjadi di wilayah Eropa yang mengharuskan Polandia untuk terlibat dalam penyelesaian krisis tersebut. Dalam sebuah survei pada tahun 2016, Polandia merupakan negara dengan persentase tertinggi setuju bahwa migrasi dari negara Muslim harus dihentikan.⁶³

3. *Governmental Structure* (Struktur Pemerintahan)

Pada faktor ini, penulis akan melihat bagaimana struktur pemerintahan di Polandia. penjelasan akan dilakukan dengan menunjukan sistem kabinet dan partai di Polandia. Struktur pemerintahan Polandia memiliki bentuk demokratis. Hal ini membuat setiap keputusan yang diambil oleh pemegang kekuasaan eksekutif harus melalui persetujuan dari parlemen dengan sistem *majority vote*. Parlemen di Polandia sendiri terdiri dari *Sejm* dan Senat. Namun peran dan pengaruh Sejm terhadap pemerintah eksekutif lebih besar jika dibandingkan dengan senat.

Dalam kurun waktu 2015-2017, pemerintahan Polandia baik eksekutif maupun legislatif dikuasai oleh partai pemenang pemilihan umum pada menjelang akhir tahun 2015. Pada pemilihan umum kali ini, *Law and Justice* (PiS) merupakan partai dengan perolehan suara mayoritas yang kemudian membuatnya mendominasi perolehan kursi di Parlemen. Pada pemilihan umum tersebut, berikut partai yang mendapatkan kursi di parlemen, PiS, Civic Platform (PO), Kukiz'15, Modern, Polish Pleasant Party (PSL), dan German Minority. Selain itu terdapat partai yang turut berpartisipasi dalam pemilihan umum namun tidak

⁶³ Chatam House The Royal Institute of International Affairs, What Do Europeans Think About Muslim Immigration?, <https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration> (diakses pada 15 Februari 2017)

mendapatkan kursi di parlemen, diantaranya United Left (ZL), KORWIN, Together, dan lainnya.

4. *Political Accountability* (Akuntabilitas Politik).

Pada faktor ini, penulis akan melihat bagaimana pemilihan umum, kompetisi partai, dan pengawasan legislatif Polandia, serta realisasi janji partai pemenang pemilu. Penulis melihat kemenangan Partai Hukum dan Keadilan (PiS) sebagai partai pengusung Beata Szydlo, turut mempengaruhi keputusan penolakan pengungsi di Polandia. Hal ini dikarenakan PiS giat menyuarakan anti-migran sebelum dan masa kampanye pemilihan umum Polandia pada tahun 2015.⁶⁴

2.3.3. *Idiosyncratic Sources* (Internal)

Variabel ini berkaitan dengan nilai, talenta, pengalaman, dan kepribadian dari pemimpin. Faktor kepemimpinan dalam hal ini Perdana Menteri Polandia yaitu Beata Szydlo menjadi faktor yang menentukan kebijakan luar negeri Polandia. Beata Szydlo yang berasal dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang cenderung bersifat anti-migran penulis lihat juga berpengaruh terhadap nilai, kepribadiannya. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, penulis membahasnya dalam satu pembahasan karena penulis merasa kedua hal tersebut memiliki keterkaitan erat satu dengan lainnya. Sedangkan pengalaman Beata Szydlo sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Polandia juga akan penulis sampaikan di bab selanjutnya. Begitupun dengan talenta yang penulis pahami berkaitan dengan pengalaman Beata Szydlo. Maka dari itu, penulis menggabungkan dua pembahasan antara pengalaman dan talenta dari Beata Szydlo.

⁶⁴ Matt Broomfield, "Poland refuses to take a single refugee because of 'security' fears", *Independent.co.uk*, 9 Mei 2016, <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-refuses-to-take-a-single-refugee-because-of-security-fears-a7020076.html> (diakses pada 25 Agustus 2017).

Tabel 2.2. Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Foreign Policy Inputs</i>	<i>External Sources</i>	<i>Alliance</i>	Adanya aliansi yang mempengaruhi pengambilan keputusan Polandia terkait krisis pengungsi di kawasan UE	Peran <i>Visegrad Group</i> dalam mempengaruhi keputusan Polandia terkait krisis pengungsi di kawasan Uni Eropa
		<i>Situational Factors: External</i>	Krisis	Serangkaian serangan di beberapa kota negara anggota Uni Eropa yang mempengaruhi keputusan Polandia
	<i>Internal Sources</i>	<i>Culture and History</i>	Konstruksi identitas Budaya dan Sejarah Polandia	Budaya dan Sejarah Polandia sebagai pembentuk identitas nasional yang mempengaruhi keputusan Polandia
		<i>Moods of Opinion</i>	Opini Publik berdasarkan polling	Opini masyarakat Polandia terhadap krisis pengungsi berdasarkan polling yang dimungkinkan mempengaruhi keputusan Polandia
		<i>Governmental Structure</i>	<i>Form of Government</i>	Struktur pemerintahan Polandia yang berbentuk demokratis parlementer yang dimungkinkan mempengaruhi keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017

		<i>Political Accountability</i>	<i>Realization of Government Accountability</i>	Penerapan nilai-nilai dari Partai pemenang pemilu dalam upaya mempertahankan akuntabilitas publik
		<i>Economic Development</i>	GDP dan Tingkat Pengangguran	GDP dan tingkat Pengangguran Polandia pada tahun 2015-2017
	<i>Idiosyncratic Sources</i>	<i>Values, Talents, Experiences, and Personalities of Leader</i>	<i>Values and Personalities of Leader</i>	Nilai dan Kepribadian yang dimiliki Perdana Menteri Beata Szydlo yang dimungkinkan mempengaruhi pengambilan keputusannya dalam suatu Kebijakan.
			<i>Talents and Experiences of Leader</i>	Talenta dan Pengalaman yang dimiliki Perdana Menteri Beata Szydlo yang dimungkinkan mempengaruhi pengambilan keputusannya dalam suatu Kebijakan.

Sumber: Hasil Olahan Penulis

2.4. RASIONALISASI PEMILIHAN INPUT

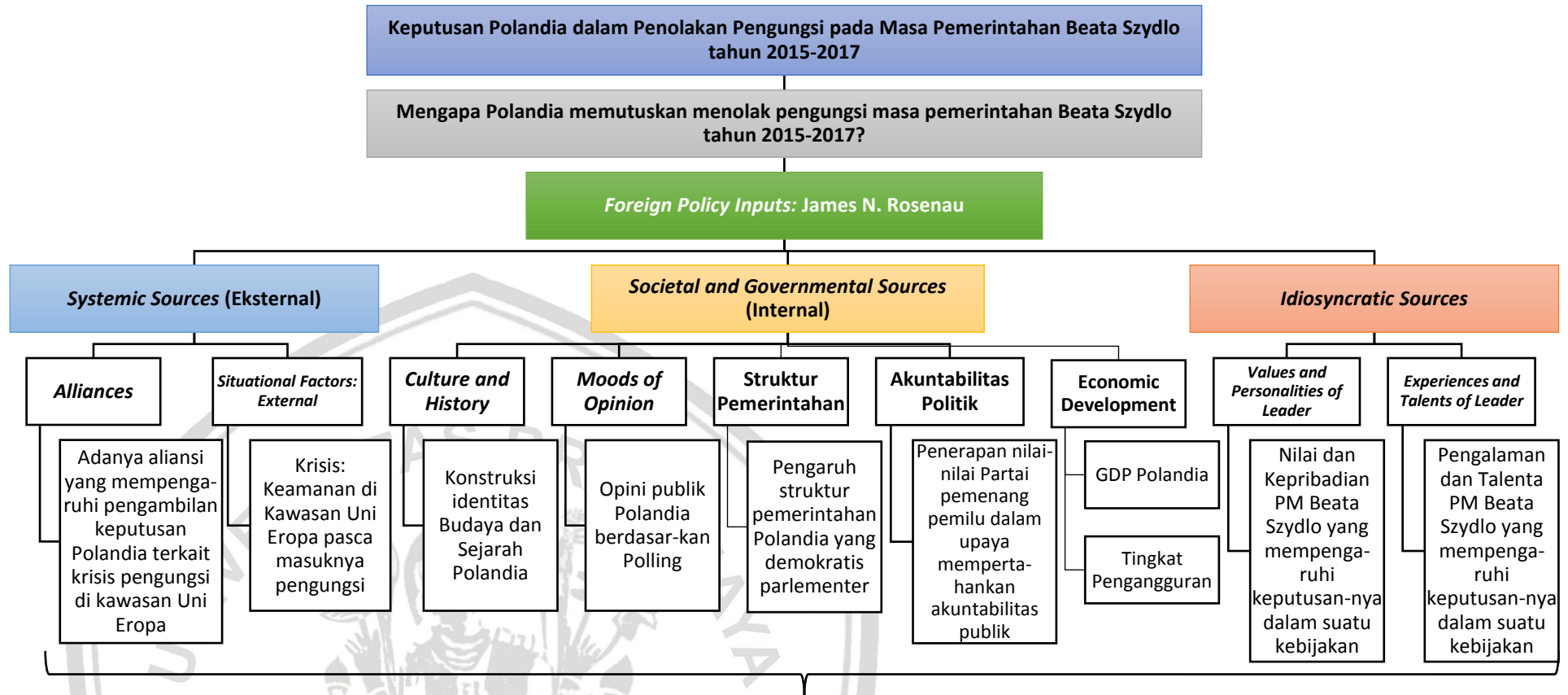
Berdasarkan tabel operasionalisasi yang penulis olah, dalam penelitian ini penulis melakukan pemilihan input-input dari teori *Foreign Policy Inputs* James N. Rosenau dengan menitikberatkan pada relevansinya dengan isu penelitian. Hal ini dikarenakan banyaknya input atau variabel yang terdapat dalam teori ini, sehingga Rosenau juga menyampaikan bahwa peneliti dianjurkan untuk melakukan *cluster of input*, dengan mengeliminasi variabel-variabel yang dinilai tidak relevan dengan penelitiannya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa variabel dari konsep sumber sistemik (eksternal) berupa aliansi dan faktor situasi eksternal. Sedangkan

dari sumber sosial dan pemerintahan, penulis menggunakan variabel budaya dan sejarah, *moods of opinion*, dan akuntabilitas politik. Kemudian ditambah dengan konsep idiosinkratik pemimpin dalam hal ini Perdana Menteri Polandia dengan *values*, *personality*, *talents*, dan *experiences*-nya sebagai variabel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Penulis beranggapan bahwa variabel-variabel tersebut bisa cukup menjelaskan keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Selain itu, terdapat variabel-variabel yang penulis pahami dapat mewakili variabel-variabel lain yang penulis eliminasi. Misalnya, variabel akuntabilitas politik yang mewakili variabel struktur pemerintahan, dan faktor situasional internal yang di dalamnya sama-sama berusaha menjelaskan pengaruh dari pemerintahan dan perpolitikan suatu negara, seperti hasil pemilihan umum, akuntabilitas publik, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel lainnya seperti budaya dan sejarah, penulis melihat bahwa variabel tersebut merupakan variabel yang sangat erat hubungannya dalam perpolitikan dan kemasyarakatan di Polandia. Demikian didapatkan input atau variabel yang akan penulis gunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

2.5. ALUR PEMIKIRAN



Polandia memutuskan menolak pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017 dikarenakan isu yang terjadi di kawasan Uni Eropa dengan peningkatan drastis jumlah pengungsi yang membuat Uni Eropa memberlakukan skema relokasi untuk menyebar beban pengungsi ke setiap negara anggota. Namun dengan krisis keamanan yang terjadi, Polandia menolak pengungsi dengan alasan prioritas keamanan untuk warga Polandia. Kemenangan *Law and Justice Party (Prawo i Sprawiedliwość – PiS)* juga menjadi pendukung keputusan ini dengan menyuarakan anti-migran selama kampanye.

2.6. HIPOTESIS

Polandia memutuskan menolak pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017 dikarenakan isu yang terjadi di kawasan Uni Eropa dengan peningkatan drastis jumlah pengungsi yang membuat Uni Eropa memberlakukan skema relokasi untuk menyebar beban pengungsi ke setiap negara anggota. Namun dengan krisis keamanan yang terjadi, Polandia menolak pengungsi dengan alasan prioritas keamanan untuk warga Polandia. Kemenangan *Law and Justice Party (Prawo i Sprawiedliwość – PiS)* juga menjadi pendukung keputusan ini dengan menyuarakan anti-migran selama kampanye.

Selain itu, aspek budaya dan juga menjadi hal yang penulis lihat berpengaruh terhadap keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi. Hal ini dikarenakan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda antara Polandia dan pengungsi yang mayoritas beragama Islam dan berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Pengalaman sejarah Polandia yang pernah membantu pembebasan Vienna dari pengepungan Kekaisaran Turki menunjukkan hubungan kontras antara Polandia dan Muslim.

Kemudian dari sisi eksternal, aliansi *Visegrad Group* berpengaruh terhadap keputusan Polandia. Di antara negara-negara anggota Uni Eropa, negara yang tergabung di *Visegrad Group* merupakan negara-negara yang menolak untuk mengimplementasikan skema relokasi dan *resettlement* Uni Eropa. Dikarenakan dalam suatu aliansi negara-negara anggota biasanya berbagi nilai-nilai yang sama, maka penulis berasumsi bahwa aliansi *Visegrad Group* mempengaruhi keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang penulis ajukan, penulis perlu untuk menjelaskan latar belakang keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017 dimana memiliki posisi sebagai unit analisis, dengan sumber internal dan idiosinkratik pada teori *Foreign Policy Inputs* James N. Rosenau sebagai unit eksplanasi. Maka dari itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif.

3.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membantu penulis lebih fokus terhadap isu yang hendak diteliti, serta rentang waktu dalam penelitian tersebut. Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan isu krisis pengungsi di Eropa, keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017, serta isu-isu lain yang dimungkinkan berkaitan dengan isu tersebut.

Penggunaan ruang lingkup yang penulis gunakan yaitu antara tahun 2015-2017, berdasar pada masa Beata Szydlo menjabat sebagai Perdana Menteri Polandia yang mulai menjabat sejak bulan September tahun 2015 sampai sekitar bulan Nopember tahun 2017. Selain itu, penulis mengacu pada pelaksanaan kebijakan skema relokasi dan *resettlement* pengungsi oleh Uni Eropa yang berlangsung sejak akhir tahun 2015 sampai akhir tahun 2017. Dengan demikian, mengacu pada ruang lingkup tersebut, penelitian ini relevan untuk dilakukan.

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, buku elektronik, artikel *online*, maupun berita-berita di media baik elektronik maupun cetak, yang relevan dengan penelitian.

3.4. TEKNIK ANALISIS DATA

Berdasarkan jenis penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi, data mengenai fenomena yang diteliti diujikan dengan dengan konsep sebagai basis analisis yang kemudian akan berpengaruh pada proses penyusunan hipotesis.

3.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Berkaitan dengan penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, maka penelitian ini akan disusun ke dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II merupakan kerangka pemikiran yang berisi studi terdahulu, kerangka konseptual, operasinalisasi konsep, alur pemikiran, dan hipotesis.

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV merupakan gambaran umum mengenai dinamika isu migrasi di Eropa dan Polandia, kemudian kebijakan Uni Eropa dan peran Polandia dalam menghadapi krisis pengungsi yang terjadi di Eropa.

BAB V merupakan pembahasan kasus penelitian dengan menguraikan operasionalisasi konsep.

BAB VI merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

DINAMIKA MIGRASI DI EROPA DAN POLANDIA

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan tentang dinamika migrasi di Eropa secara umum dan Polandia sebagai negara pengirim migran di kawasan Eropa. Menurut Helen Hughes, fenomena migrasi manusia telah ada setua peradabannya. Pada masa itu, migrasi manusia dilatarbelakangi alasan perubahan lingkungan dan iklim. Sedangkan perkembangan faktor pendorong dan penarik terjadinya migrasi pada masa sekarang dapat dilihat dari keinginan migran untuk melepaskan diri dari tekanan politik, agama, budaya, serta himpitan ekonomi.⁶⁵

Untuk mengetahui perkembangan migrasi manusia, khususnya di Eropa penulis akan menyampaikan temuan yang dikemukakan oleh Hein de Haas dalam hasil penelitiannya yang berjudul *European Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Policies*,⁶⁶ didukung dengan beberapa referensi yang berkaitan dengan isu tersebut. Kemudian, akan disampaikan juga mengenai kebijakan skema relokasi dan *resettlement* pengungsi oleh Uni Eropa, serta peran Polandia dalam menghadapi krisis pengungsi.

4.1. Dinamika Migrasi di Eropa

Migrasi pekerja dan pengungsi telah menjadi bagian dari sejarah kawasan Eropa. Di antara negara-negara dengan sejarah kolonial, migrasi menjadi isu

⁶⁵ Helen Hughes, "Immigrants, Refugees, and Asylum Seekers: A Global View", *The Centre for Independent Studies Policy Monograph 54*, diakses dari <http://www.cis.org.au/app/uploads/2015/07/pm54.pdf> pada 14 Desember 2018.

⁶⁶ Hein de Haas, "European Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Policies", *Publications Office of the European Union*, Luxembourg: 2018 diakses dari <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109783> pada 28 Nopember 2018.

utama beriringan dengan kebebasan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada masa tahun 1950-1970an, negara-negara Eropa Barat secara lebih jauh menyaksikan bagaimana terjadinya migrasi tenaga kerja yang masif dari kawasan selatan Eropa, seperti Turki dan Afrika Utara, walaupun pada masa ini, migrasi berkaitan dengan permintaan dan suplai tenaga kerja, bukan tentang tantangan sosial dan lainnya. Kemudian, setelah terjadinya resesi ekonomi pada pertengahan tahun 1970, migrasi dan pengetatannya menjadi topik perdebatan, sampai pada dekade-dekade selanjutnya.⁶⁷

Untuk melihat dinamika migrasi di Eropa, penulis menguraikan beberapa data yang menunjukkan fase-fase perkembangan migrasi di Eropa dari masa ke masa. Keempat fase tersebut erat kaitannya dengan perubahan ekonomi dan seiringan perubahan dalam ideologi ekonomi, perubahan struktur permintaan tenaga kerja Eropa, perubahan demografi, serta proses integrasi dan perluasan kawasan Eropa. Sebelumnya, akibat pengaruh dari dekolonisasi, perubahan demografi, pesatnya pertumbuhan ekonomi, serta pembentukan Uni Eropa sebagai zona bebas perdagangan dan migrasi, memunculkan Eropa sebagai tujuan utama migrasi global.⁶⁸

Pada fase pertama antara tahun 1945 sampai 1970, perusahaan-perusahaan berskala besar menfokuskan investasi pasca perang dan ekspansi produksi di negara-negara maju Eropa. Sebagian di antaranya dibantu dengan program *US Marshal* yang kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

⁶⁷ Jeroen Doomernik dan María Bruquetas-Callejo, "National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973", Chapter 4 dalam *Integration Processes and Policies in Europe Contexts, Levels and Actors*, diakses dari <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-21674-4.pdf> pada 14 Desember 2018, halaman 57.

⁶⁸ Ibid, halaman 6.

tinggi serta peningkatan kekurangan tenaga kerja berketerampilan rendah disamping juga akibat perubahan demografi dan peningkatan tingkat pendidikan berkontribusi pada penurunan suplai tenaga kerja domestik.⁶⁹

Hasil yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah perekrutan besar-besaran tenaga kerja migran dari negara yang relatif kurang maju dari kawasan Mediterania pada saat itu. Selain itu juga dari negara seperti Irlandia, Finlandia ke negara Eropa Barat sebagai basis industri seperti Jerman Barat, Swiss, Italia bagian utara, Belgia, Austria, Perancis, Belanda, Inggris, Denmark, Swedia, dan Luxembourg. Kemudian dari tahun 1960-an, terjadi transisi migrasi di negara-negara tersebut dikarenakan penuaan dan pertumbuhan ekonomi, perekrut dari negara-negara seperti Jerman, Belgia, Perancis, dan Skandinavia mulai meningkatkan perekrutan tenaga kerja dari Maroko, Turki, Tunisia, Aljazair, dan juga dari beberapa negara bekas koloni seperti Mali dan Senegal ke Perancis, Karibia ke Inggris.⁷⁰

Akhir dari fase ini ditandai dengan krisis minyak tahun 1973, yang kemudian membekukan perekrutan juga sebagai awal dari serangkaian resesi ekonomi sampai memasuki tahun 1980an. Bersama dengan jatuhnya tingkat kelahiran, dan juga peningkatan biaya tenaga kerja di negara-negara kaya, mendorong restrukturisasi ekonomi global, melibatkan investasi modal pada area industri baru di negara berkembang, mengubah pola perdagangan dunia, serta pengenalan teknologi-teknologi baru.⁷¹

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Kemudian dilanjutkan fase ke dua antara tahun 1970 sampai pertengahan 1990an. Fase ini bertepatan dengan suatu pemerataan kebijakan ekonomi neoliberal yang didominasi oleh deregulasi ekonomi, seperti fleksibilisasi pasar tenaga kerja dengan meningkatkan perekrutan sementara pekerja migran, pencabutan subsidi negara pada sektor-sektor seperti tambang, galangan kapal, dan industri berat, privatisasi perusahaan milik negara, perpajakan yang kurang progresif, peningkatan ketimpangan ekonomi, serta pengikisan parsial yang dipicu oleh pengaturan jaminan sosial.⁷²

Beberapa perubahan dalam bidang politik dan ekonomi tersebut berkontribusi pada pemecatan massal pekerja pabrik dan tambang, serta pekerja migran lainnya. Pada periode ini, produksi industri dialihkan ke negara-negara dengan tingkat upah rendah. Kembalinya pekerja dalam skala besar yang telah diantisipasi sebagai akibat dari pembekuan rekrutmen nyatanya tidak terjadi. Pekerja migran lebih memilih untuk menetap dan membawa serta keluarganya dikarenakan ketidakpastian umum serta kemungkinan penutupan perbatasan.⁷³

Reuni keluarga dan pernikahan baru antara generasi kedua dan pasangan yang tinggal di komunitas asal adalah faktor penting dalam menjelaskan mengapa migrasi dari Maghreb, Turki, dan negara asal lainnya terus berlanjut pada tingkat yang relatif tinggi bahkan selama periode resesi. Namun, pengangguran massal dan segregasi berkontribusi pada marginalisasi jangka panjang atas bagian penting dari populasi imigran ini serta generasi kedua.⁷⁴

⁷² Ibid, halaman 8.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

Dari pertengahan 1980-an, terjadi pertumbuhan ekonomi kembali. Perkembangan pesat di sektor jasa akan menarik lebih banyak tenaga kerja migran baik dengan keterampilan rendah maupun tinggi. Sementara permintaan pekerja di sektor agrikultur dan konstruksi tidak mengalami perubahan. Namun, dengan pergeseran ekonomi ke bidang jasa, permintaan pekerja di bidang industri yang tidak tumbuh, mengarah pada pengangguran jangka panjang para pekerja migran dengan keterampilan rendah.

Perkembangan perbedaan cabang pasar tenaga kerja memicu kebutuhan kembali pekerja kasar di bidang agrikultur dan sektor jasa baik formal maupun informal. Hal ini juga termasuk peningkatan permintaan pekerja rumah tangga wanita, dikarenakan pada saat itu terjadi peningkatan jumlah wanita yang memasuki angkatan kerja terampil. Pada saat yang sama, pertumbuhan pekerjaan layanan khusus menyebabkan meningkatnya permintaan untuk pekerja migran yang sangat terampil. Ini memberikan dorongan lebih lanjut untuk lebih memfasilitasi mobilitas tenaga kerja intra-Uni Eropa. Meskipun hak untuk migrasi tenaga kerja bebas sudah ditetapkan sejak 1968, salah satu tujuan utama dari perjanjian Maastricht (1992), pembentukan bersama Uni Eropa dan gagasan kewarganegaraan Eropa, serta perluasan Uni Eropa adalah untuk mendorong mobilitas tenaga kerja bebas, yang umumnya dilihat pemerintah akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di negara tujuan dan negara asal.⁷⁵

Fase ketiga ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 sekaligus sebagai tanda keruntuhan Uni Soviet dan komunis Pakta Warsawa, yang kemudian memunculkan pemerintahan demokratis di Eropa Tengah dan

⁷⁵ Ibid. Halaman 8

Timur, sampai krisis ekonomi tahun 2008. Dampak dari hal tersebut adalah terjadi percepatan migrasi sementara para pencari suaka yang mencari suaka di Eropa Barat. Periode ini merupakan periode di mana terjadi liberalisasi ekonomi bersamaan dengan masuknya Eropa Tengah dan Timur dalam area bebas migrasi Eropa.⁷⁶

Fase ini juga menunjukkan terjadinya pembukaan perbatasan tenaga kerja baru di Eropa Tengah dan Timur, di antaranya Polandia, Romania, Bulgaria, Ukraina, Albania, dan Republik Baltik. Negara-negara tersebut menjadi kawasan sumber baru migran bagi Eropa Barat dan Selatan, kemudian juga menjadi negara transit dan imigrasi atas kehendak mereka sendiri. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan ekonomi terbaru dan kemunculan tujuan migrasi baru di pinggiran Eropa Barat dan Selatan di mana Irlandia, Italia, dan Spanyol menarik banyak migran dari Eropa Timur, Afrika Utara dan Barat, serta Amerika Latin. Hal ini merupakan perubahan penting dari periode sampai 1990, saat migrasi non-Uni Eropa didominasi migrasi dari Turki dan negara-negara Maghrib. Perkembangan ini bertepatan dengan kelanjutan integrasi Eropa, pembentukan zona Schengen dan penguatan bersama kontrol perbatasan eksternal UE. Pada 1990-an, khususnya Spanyol dan Italia benar-benar menjadi negara tujuan migrasi.⁷⁷

Kemudian yang terkini yaitu fase keempat yang dimulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Fase ini ditandai dengan krisis ekonomi global pada tahun 2008 di mana terjadi setidaknya untuk sementara mengakhiri perkembangan dan

⁷⁶ Ibid, halaman 9.

⁷⁷ Ibid.

perluasan ekonomi Uni Eropa, dan migrasi Eropa yang dikarakteristikan dengan konsolidasi dan stabilisasi migrasi intra – Uni Eropa dan kelanjutan imigrasi yang tinggi dari negara-negara non-UE.⁷⁸

Efek dari krisis tersebut berdampak pada migrasi dalam internal Uni Eropa dan migrasi dari negara non EU25 seperti Yunani, Spanyol, Portugal dan Irlandia yang menunjukkan peningkatan emigrasi. Hal yang kemudian menyebabkan peningkatan migrasi *South-North* dengan pergerakan orang-orang Spanyol, Portugis, dan Italia ke bagian utara Eropa. Antara tahun 2007 sampai 2012 terjadi penurunan migrasi di negara-negara Uni Eropa. Pada tahun 2012, migrasi legal permanen dari negara ke tiga ke Eropa relatif lebih sedikit daripada ke Amerika Serikat.⁷⁹

Berawal dari tahun 2012, dan khususnya sejak 2015, migrasi baik intra-UE (Timur-Barat dan juga, sampai batas tertentu, Selatan-Utara) dan migrasi luar UE terulang, terutama sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang membaik dan pengangguran yang menurun di Eropa utara dan barat. Pada tahun 2015 total migrasi intra-UE adalah 1,4 juta sementara total migrasi legal dari negara-negara non-UE seperti Syria dan lainnya adalah 2,4 juta.⁸⁰

Sejak tahun 2015, perdebatan migrasi di Eropa semakin didominasi oleh peningkatan migrasi pengungsi dari Suriah dan negara lainnya yang memasuki Turki kemudian Yunani memasuki kawasan Eropa, *boat migration*, dan penyelundupan dari Afrika Utara. Haas menyampaikan bahwa meskipun hal tersebut seolah merupakan fenomena baru, namun migrasi kapal *trans-*

⁷⁸ Ibid, halaman 10.

⁷⁹ Ibid, halaman 11.

⁸⁰ Ibid.

Mediterranean telah dimulai sejak 1991 dan mengalami peningkatan pada beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari pengetatan serta pengawasan imigrasi dan perbatasan.⁸¹

Haas juga menyampaikan data tentang jumlah pencari suaka yang datang ke Eropa, di mana presentase sebesar 25% mewakili pencari suaka berkebangsaan Suriah, dan 16% Afghanistan. Sebanyak 440.000 aplikasi suaka sudah terdaftar dan lebih dari 1 juta masih dalam tahap pra-pendaftaran. Kemudian semenjak tahun 2016, terjadi penurunan jumlah aplikasi suaka seiring dengan peningkatan pengawasan perbatasan, serta secara relatif terjadi pengurangan intensitas konflik di negara asal.⁸²

4.2. Dinamika Migrasi Polandia

Hampir selama abad ke-20, Polandia merupakan negara pengirim, baik pengungsi, maupun migran secara umum. Dihadapkan dengan kelambatan laju ekonomi, serta kehancuran yang diakibatkan perang, lebih dari satu juta migran Polandia bermigrasi untuk mencari kesejahteraan di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Seperti negara-negara di kawasan timur Eropa, pemerintahan Polandia menjalankan pendekatan isolasionis dalam kebijakan migrasinya, mengawasi dengan ketat baik emigrasi maupun imigrasi, serta secara masif membatasi pemberian suaka kepada negara lain yang menghadapi perjuangan kelas, seperti Vietnam.⁸³

⁸¹ Ibid, halaman 12.

⁸² Ibid.

⁸³ Bart Bachman "Diminishing Solidarity: Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis, *Migration Policy Institute*, diakses dari

Kemudian pada tahun 1990-an, mulai terjadi perubahan terkait kebijakan-kebijakan tersebut sebagaimana Polandia melakukan liberalisasi ekonomi, serta dalam upanyanya mensejajarkan dengan Eropa Barat, pemerintah Polandia membentuk suatu aturan suaka selaras dengan standar internasional dan Konvensi 1951 mengenai pengungsi. Individu-individu dari negara-negara bekas Uni Soviet, Afghanistan, Somalia, dan lain-lain mulai mencari suaka di Polandia. Pada saat itu pula, pemerintah Polandia memposisikan dirinya sebagai dermawan terhadap warga Bosnia dan Republik Ceko.⁸⁴

Perubahan terbesar pada profil migrasi Polandia beriringan dengan akses Polandia kepada Uni Eropa pada tahun 2004 dengan adanya kebebasan mobilitas bagi warga negara anggota. Dalam kurun waktu dua tahun lebih dari 264.000 warga Polandia telah mendapatkan persetujuan bekerja di Inggris. Hingga tahun 2015, diperkirakan sebanyak satu sampai dua juta warga Polandia tinggal di negara anggota Uni Eropa lain.⁸⁵

Perbedaan sikap Polandia antara kesediannya dalam mendukung kebebasan mobilitas Uni Eropa sebagai suatu keuntungan, khususnya terkait migrasi tenaga kerja, dengan ketidaksediaan Polandia untuk berbagi beban untuk membantu pengungsi yang datang ke Eropa memberikan label Polandia sebagai negara bermuka dua. Kritik tersebut muncul dikarenakan dengan pengalaman Polandia sebagai negara dengan sejarah migrasi, diharapkan akan lebih menunjukkan simpatinya terhadap keadaan pengungsi. Namun, pemerintahan

<https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis> pada 12 Desember 2018.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

Polandia mengesampingkan hal tersebut dan fokus untuk melakukan apa yang dianggap terbaik untuk negaranya.⁸⁶

Berkaitan dengan hubungan antara Polandia dan migrasi, terdapat suatu hal yang menarik yang akan penulis bahas pada bab ini. Ketika Polandia secara resmi menjadi negara anggota Uni Eropa pada tahun 2004, hanya tiga negara anggota Uni Eropa yang membuka secara langsung pasar tenaga kerja mereka bagi warga kebangsaan Polandia. Ke tiga negara tersebut adalah Inggris, Swedia, dan Irlandia. Kemudian pada akhir tahun 2006, warga Polandia dapat bekerja dengan bebas juga di Yunani, Portugal, Finlandia, Italia, dan Spanyol.⁸⁷

Perkembangan pesat ekonomi Eropa pada tahun 2000an seolah menjadi ruang bagi warga Polandia sebagai tenaga kerja di negara-negara Uni Eropa lainnya. Kebanyakan dari mereka berangkat ke Inggris dan Irlandia di mana di sana perkembangan ekonomi di sektor konstruksi dan pelayananan sedang pesat. Selain itu, Norwegia dan Belanda juga menjadi tujuan atas pertumbuhan ekonomi dan runtuhnya penghalang imigrasi.⁸⁸

Kementerian Luar Negeri Polandia memperkirakan sekitar 15 sampai 16 juta diaspora Polandia, termasuk di dalamnya seseorang tinggal di luar negara yang memiliki kewarganegaraan atau keturunan Polandia. Berikut negara-negara

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Krystyna Iglicka dan Magdalena Ziolek-Skrzypczak, "EU Membership Highlights Poland's Migration Challenges", *Migration Policy Institute*, diakses dari <https://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges> pada 29 Nopember 2018.

⁸⁸ Ibid.

dengan populasi warga Polandia terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris.⁸⁹

Pada tahun 2008, survei yang dilakukan oleh biro sensus Amerika Serikat menunjukkan data perkiraan populasi warga Polandia di Amerika Serikat sekitar 478.569 jiwa. Negara bagian dengan populasi warga Polandia diantaranya, Illinois, New York, Connecticut, Florida, dan New Jersey. Imigran Polandia bekerja di berbagai sektor seperti manufaktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, kemudian konstruksi, manajemen, administratif, dan lain sebagainya. Statistik imigration tahun 2009 yang diterbitkan oleh *The U.S. Department of Homeland Security's* dilaporkan bahwa 119.271 orang Polandia memperoleh status warga permanen Amerika Serikat antara tahun 2000-2009.⁹⁰

Di Jerman, menurut *Central Register on Foreigners of the German Federal Statistical Office*, sebanyak 398.513 warga Polandia terdaftar di Jerman pada akhir Desember 2009, 3,8% dari mereka lahir di Jerman. Warga Polandia terdiri atas 6% dari semua warga negara asing di Jerman dan merupakan kelompok terbesar ketiga setelah warga Turki dan Italia.⁹¹

Di luar kewarganegaraan, sekitar 1,3 juta orang melaporkan memiliki latar belakang migrasi dari Polandia pada 2008, menurut Microcensus Jerman 2008 latar belakang migrasi termasuk mereka yang lahir di luar negeri dan bermigrasi ke Jerman serta mereka yang lahir di Jerman dari imigran orang tua atau kakek-nenek. Kelompok ini terkonsentrasi di bagian barat dan selatan

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

Jerman, khususnya negara bagian North Rhine-Westphalia. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran. Sekitar 10% dari imigran Polandia merupakan lulusan pendidikan tinggi, sedangkan 6% dilaporkan tidak bekerja.⁹²

Di Inggris, sekitar 520.000 warga Polandia berada di Inggris pada Desember 2009 berdasarkan survei populasi tahunan. Hal ini membuat Polandia sebagai negara sumber migran terbesar setelah India di Inggris. Sekitar 20% imigran Polandia tinggal di London di mana mereka menempati posisi empat besar di antara kelompok yang lahir di luar negeri. Sebanyak 83,8% orang Polandia usia antara 16 sampai 64 tahun mempunyai pekerjaan.⁹³

Pembahasan selanjutnya akan mengarah pada upaya Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi serta peran Polandia dalam isu tersebut.

4.3. *EU Relocation and Resettlement Scheme*

Pada tahun 2015 Komisi Uni Eropa mengambil tindakan untuk membantu mengatasi krisis pengungsi yang dihadapi negara anggota Uni Eropa dan negara-negara tetangganya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kebijakan migrasi Eropa, Komisi mengusulkan untuk merelokasi 160.000 orang dengan kebutuhan yang jelas akan perlindungan internasional dari negara-negara anggota di bawah tekanan ekstrem kepada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal ini juga sebagai upaya menunjukkan solidaritas konkret antara negara anggota Uni Eropa. Skema relokasi dan *resettlement* ini dibentuk pada bulan September 2015 di mana sebanyak 160.000 pengungsi yang berada Italia dan Yunani (dan jika

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

relevan dari negara anggota lainnya) ke negara-negara anggota Uni Eropa sampai September 2017.⁹⁴

Dalam resolusi pada 28 April 2015, Parlemen Eropa menegaskan kembali bahwa Uni Eropa harus segera menanggapi tragedi di Mediterania dengan dasar solidaritas serta pembagian tanggung jawab yang adil di antara negara anggota, dalam upayanya untuk membantu negara anggota dengan tingkat kedatangan pengungsi serta perpohonan perlindungan internasional tertinggi. Selain itu, negara anggota yang berada di garis depan kedatangan pengungsi, harus meningkatkan upaya mereka dalam mengatasi aliran migrasi di perbatasan eksternal Uni Eropa. Upaya-upaya tersebut juga termasuk melindungi hak-hak orang yang membutuhkan perlindungan internasional, serta mencegah migrasi tidak teratur.⁹⁵

Diantara negara anggota Uni Eropa, dua negara yang mengalami tekanan signifikan akan masuknya pengungsi, khususnya pada sistem migrasi dan suaka adalah Italia dan Yunani. Gelombang migrasi yang belum pernah dialami sebelumnya, serta permintaan atas perlindungan internasional, sampai di wilayah mereka.⁹⁶ Maka dari itu, tertanggal 20 Juli 2015, Dewan Eropa menyepakati untuk melakukan relokasi pengungsi dari Itali dan Yunani sebanyak 40.000 orang. Relokasi ini dicanangkan memakan waktu dua tahun, dengan rincian sebanyak 24.000 orang akan direlokasi dari Itali, dan 16.000 orang dari Yunani ke negara-negara anggota Uni Eropa.⁹⁷

⁹⁴ European Commission - Press Release, *Relocation and Resettlement: EU Member States urgently need to deliver*, Brussels 16 Maret 2016, diakses dari http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-829_en.htm pada 28 Agustus 2018.

⁹⁵ Ibid, halaman 3.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid, halaman 5.

Berdasarkan data dari Eurostat, sebanyak 39.183 orang mengajukan permohonan perlindungan internasional di Itali antara bulan Januari sampai Juli 2015, meningkat 27% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014. Hal tersebut juga dialami Yunani dimana peningkatan permohonan perlindungan internasional di Yunani terhitung sebanyak 30%.⁹⁸ Dengan peningkatan tersebut dalam delapan bulan pertama tahun 2015, pada 22 September 2015 Dewan Eropa menambah jumlah kuota relokasi, yakni sebanyak 120.000 orang.⁹⁹

Berikut alokasi yang diberikan ke negara-negara anggota Uni Eropa dalam skema relokasi dan *resettlement* pengungsi yang berada di Italia dan Yunani.

Tabel 4.1. Alokasi Kuota Relokasi Pengungsi dari Itali dan Yunani tahun 2015

	Allocation per Member State (15 600 applicants relocated) from Italy	Allocation per Member State (50 400 applicants relocated) from Greece
Austria	462	1.491
Belgium	579	1.869
Bulgaria	201	651
Croatia	134	434
Cyprus	35	112
Czech Republic	376	1.215
Estonia	47	152
Finland	304	982
France	3.064	9.898
Germany	4.027	13.009
Hungary	306	988
Latvia	66	215
Lithuania	98	318
Luxembourg	56	181
Malta	17	54
Netherlands	922	2.978
Poland	1.201	3.881
Portugal	388	1.254

⁹⁸ Ibid, halaman 6.

⁹⁹ Ibid, halaman 7.

Romania	585	1.890
Slovakia	190	612
Slovenia	80	257
Spain	1,896	6.127
Sweden	567	1.830

Sumber: Annex I dan II, Council of the European Union, *Council Decision*

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2017, Jerman merupakan negara dengan tingkat pelaksanaan relokasi tertinggi dengan 3.511 aplikasi, kemudian Perancis dengan 3.157 aplikasi, dan Belanda dengan 1.636 aplikasi. Namun, negara yang sampai tahun 2017 konsisten terhadap penerimaan aplikasi sesuai yang dimandatkan dan juga tepat waktu, adalah Malta dan Finlandia, baik pengungsi yang sebelumnya berada di Itali maupun Yunani.¹⁰⁰

4.4. Peran Polandia dalam Menghadapi Krisis Pengungsi

Pada bulan September 2015, Dewan Eropa meningkatkan kuota relokasi pengungsi sebanyak 120.000 dari Italia dan Yunani dimana pada awalnya hanya 40.000 dengan rincian 24.000 dari Italia dan 16.000 dari Yunani. Seiring berjalannya kebijakan tersebut ditemukan bahwa akhirnya hanya 98.255 pengungsi yang dapat direlokasi ke negara anggota Uni Eropa.¹⁰¹

Relokasi ini di dasarkan pada jumlah populasi dengan nilai 40%, total GDP 40%, jumlah aplikasi suaka dan jumlah pengungsi yang telah menetap di negara tersebut per 1 juta penduduk dalam kurun waktu 2010-2014 dengan nilai 10%, serta tingkat pengangguran dengan nilai 10%. Keputusan tersebut diadopsi sesuai dengan voting bersama. Keputusan yang diadopsi dengan dasar keputusan

¹⁰⁰ European Commission, *Report from The Commission to The European Parliament, The European Council And The Council*, eleventh report on relocation and resettlement, halaman 3.

¹⁰¹ Council of the European Union, *Council Decision establishing provisional measures in the area of international protection for benefit of Italy and Greece*. Legal Acts and Other Instruments, Brusel 22 September 2015, halaman 2.

voting mayoritas ini membuat negara-negara yang menolak kebijakan ini, seperti Slovakia, Republik Ceko, Romania, dan Hungaria, diharuskan juga untuk mentaati kebijakan tersebut.¹⁰²

Polandia yang tadinya menyatakan setuju dengan kebijakan ini tidak menunjukkan pengimplementasian kebijakan ini bahkan sampai akhir kebijakan ini yaitu akhir tahun 2017. Maka dari itu, Komisi Uni Eropa berusaha untuk menuntut Polandia dengan membawanya ke ranah hukum melalui *the European Court and Justice*. Padahal pada tahun 2015, Polandia telah menyatakan komitmennya untuk menerima 6.182 pengungsi, termasuk ke dalam 4 besar negara dengan kuota relokasi pengungsi di antaranya Jerman, Perancis, dan Spanyol.¹⁰³

Relokasi tersebut didasarkan pada solidaritas antar negara anggota Uni Eropa untuk membantu meringankan beban negara anggota lain yang terdampak situasi darurat, dalam hal ini Yunani dan Italia yang terdampak masuknya pengungsi dalam jumlah yang masif. Kelebihan beban tersebut membuat Dewan Eropa memberlakukan kebijakan relokasi ke negara-negara anggota lainnya.¹⁰⁴

Polandia mendapat alokasi sebanyak 1.201 dari Italia, dan 3.881 dari Yunani.¹⁰⁵ Namun, berdasarkan laporan Komisi Eropa tahun 2017, Hungaria dan Polandia masih belum berpartisipasi dalam skema relokasi sehingga tidak memenuhi kewajiban hukum mereka. Republik Ceko sejak Mei 2016 belum

¹⁰² Senada S. Sabic, "The Relocation of Refugees in the European Union- Implementation of Solidarity and Fear", *Friedrich Ebert Stiftung*. Zagreb, Oktober 2017, halaman 5.

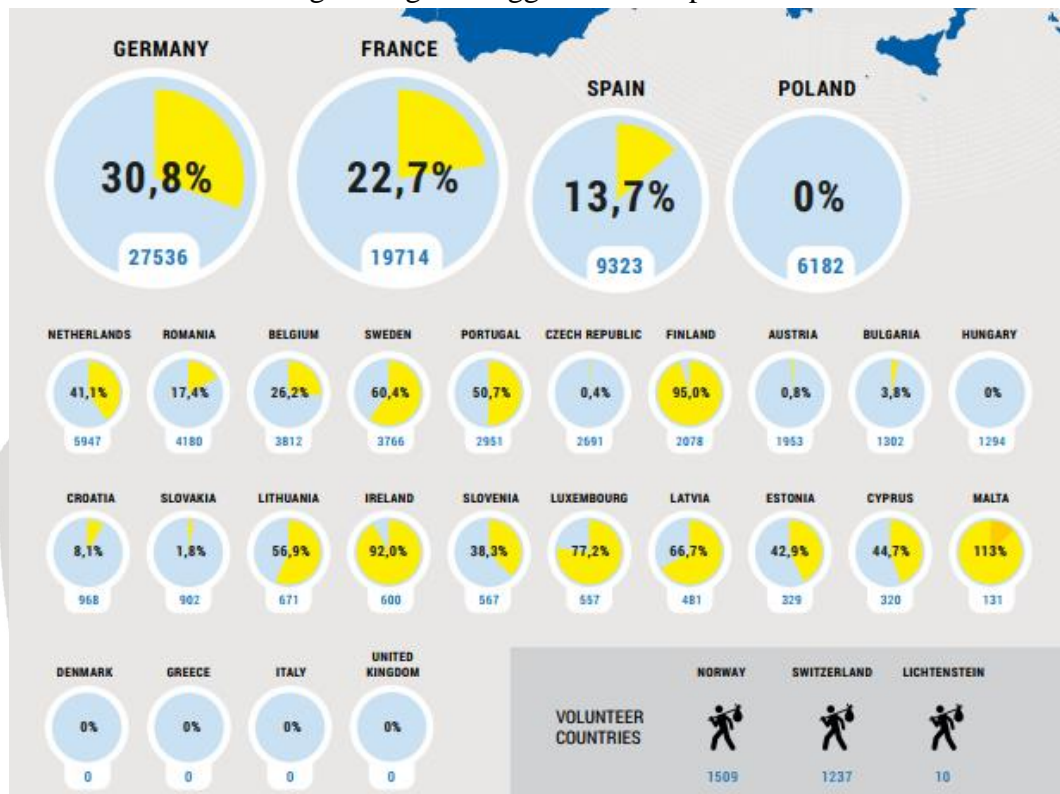
¹⁰³ Ibid, halaman 7.

¹⁰⁴ Council of the European Union, *Council Decision establishing provisional measures in the area of international protection for benefit of Italy and Greece*. Legal Acts and Other Instruments, Brusel 22 September 2015, halaman 2.

¹⁰⁵ Council of The European Union, *COUNCIL DECISION Establishing Provisional Measures in The Area of International Protection for The Benefit of Italy And Greece*, Annex I dan II.

melanjutkan relokasi dan belum merelokasi siapa pun sejak Agustus 2016, setelah merelokasikan kurang dari 1% dari alokasinya. Sedangkan Bulgaria, Kroasia dan Slovakia melakukan relokasi secara terbatas (2% dari alokasi).¹⁰⁶

Gambar 4.1. Pelaksanaan Relokasi dan Resettlement Pengungsi dari Italia dan Yunani ke Negara-negara Anggota Uni Eropa tahun 2015-2017



Sumber: Annex III, *Fifteenth Report on Relocation and Resettlement*

Berdasarkan laporan ke lima belas *relocation and resettlement*, 6 September 2017, terjadi tren positif tentang proses relokasi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata relokasi sebanyak 2.700 setiap bulannya sejak Februari 2017. Namun, upaya tambahan dibutuhkan dari negara anggota Uni Eropa untuk memastikan setiap pemohon yang memenuhi syarat dapat direlokasi.¹⁰⁷ Dalam laporan ini disebutkan bahwa Hungaria dan Polandia merupakan dua negara

¹⁰⁶ European Commission, *Report from The Commission to The European Parliament, The European Council And The Council*, Op. cit.

¹⁰⁷ European Commission, *Report from The Commission to The European Parliament, The European Council And The Council*, fifteenth report on relocation and resettlement, halaman 3.

anggota yang sama sekali belum melakukan relokasi satu orang pun. Polandia juga tidak memberikan ikrar untuk melakukan relokasi sejak 16 Desember 2015.¹⁰⁸ Sekitar sejak Beata Szydlo menjabat sebagai Perdana Menteri Polandia, menggantikan Ewa Kopacz yang sebelumnya menyatakan menerima skema relokasi dan *resettlement* ini.

Dari penjelasan pada bab IV ini, dapat ditemukan bagaimana perkembangan migrasi di kawasan Eropa sebagai pencerahan bahwa migrasi bukanlah suatu isu baru yang dihadapi Eropa. Bahkan pada awal fase pasca perang dunia II, migrasi merupakan sesuatu yang dibentuk atau diupayakan. Misalnya terjadinya perekrutan tenaga kerja dari negara-negara yang masih kurang maju ke negara-negara di mana perusahaan-perusahaan besar pada saat itu menjalankan bisnisnya.

Migrasi merupakan isu lumrah yang dihadapi Eropa dimana kebijakan pergerakan bebas arus ekonomi dan manusia di antara negara-negara anggota Uni Eropa berkontribusi atas terjadinya migrasi. Perkembangan ekonomi yang pesat menjadi daya tarik bagi migran dari negara-negara berkembang seperti dari negara Eropa Tengah dan Timur yang relatif baru bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Polandia misalnya, walaupun pada awal menjadi anggota yaitu pada tahun 2004, Inggris, Irlandia, dan Swedia secara sigap membuka pasar tenaga kerja mereka bagi warga Polandia, dan kemudian berangsur negara-negara anggota lain membuka diri bagi migran tenaga kerja Polandia.

¹⁰⁸ Ibid.

Krisis pengungsi yang ditandai dengan meluapnya arus pengungsi dari negara-negara yang mengalami konflik internal bersenjata, khususnya dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara ke kawasan Eropa, dengan melalui Yunani dan Italia sebagai pintu utama. Italia dan Yunani mencapai keberdayaannya dalam pengatasan permasalahan tersebut, sehingga membutuhkan bantuan, khususnya dari rekan negara-negara anggota Uni Eropa. Menilai situasi yang ada, kemudian Dewan Eropa memberlakukan kebijakan skema relokasi dan *resettlement* yang bertujuan merelokasi sejumlah pengungsi yang berada di Italia dan Yunani ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Polandia sampai tahun 2017, batas akhir dari kebijakan skema ini, tidak mengimplentasikan mandat dari kebijakan tersebut dengan tidak menerima atau merelokasi satupun pengungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB V

ANALISIS SUMBER-SUMBER EKSTERNAL DAN INTERNAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLANDIA DALAM PENOLAKAN PENGUNGSI MASA PEMERINTAHAN BEATA SZYDLO TAHUN 2015-2017

Bab ini akan memaparkan data dan analisis penulis berkaitan dengan isu yang penulis teliti, yaitu keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017, dengan menguraikan secara lebih spesifik variabel-variabel dalam operasionalisasi konsep yang penulis susun pada bab sebelumnya.

5.1. *Systemic Sources* (Sumber Eksternal)

Systemic sources mengacu pada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua faktor atau variabel dalam sumber eksternal yang penulis nilai relevan untuk menjelaskan keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia pada masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Variabel-variabel tersebut diantaranya, *Alliances* dan Faktor Situasional Eksternal (Krisis).

5.1.1. *ALLIANCES*

Suatu aliansi dibentuk karena adanya kesamaan pandangan, juga tujuan yang ingin dicapai. Ketika suatu negara bergabung ke dalam suatu aliansi, terdapat pengaruh dari aliansi tersebut terhadap kebijakan luar negerinya. Hal ini

dikarenakan terdapat kepentingan-kepentingan dalam aliansi tersebut, yang biasanya ditujukan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰⁹

Berkaitan dengan isu dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan tentang *Visegrad Group* atau V4. Suatu kerjasama yang beranggotakan empat negara yang terletak di Eropa Tengah yaitu, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, dan Polandia. Aliansi ini terjalin tidak hanya dikarenakan letak geografis yang bertetangga satu dengan lainnya, melainkan keempat negara ini berbagi beberapa faktor yang relatif sama seperti, sejarah, tradisi, serta budaya dan nilai-nilai.¹¹⁰

Berdasarkan isi Deklarasi tahun 2011, V4 menegaskan kembali fokus dari aliansi ini. Perdana Menteri dari masing-masing negara anggota V4, mengemukakan bahwa pembentukan *Visegrad Group* merupakan peristiwa penting dalam sejarah modern negara anggota V4. Secara signifikan aliansi ini berkontribusi dalam memfasilitasi negara anggota V4 untuk berintegrasi ke dalam Uni Eropa. Deklarasi kerjasama antara negara anggota V4 yang ditandatangani 27 tahun lalu pada 15 Februari 1991 di Visegrad, meletakkan pondasi dasar serta kerangka jangka panjang kerjasama ini yang meliputi politik, ekonomi, dan budaya.¹¹¹

Bersama runtuhnya komunisme pada tahun 1989, memberikan dampak positif terhadap setiap negara anggota V4. Hal tersebut berdampak pada kemajuan kesuksesan kerjasama di antara mereka yang berbagi nilai yang sama tentang

¹⁰⁹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, Op.cit., halaman 23.

¹¹⁰ About Visegrad Group, diakses dari <http://www.visegradgroup.eu/about> pada 16 Agustus 2017.

¹¹¹ The Bratislava Declaration of the Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on the occasion of the 20th anniversary of the Visegrad Group. 15 Februari 2011, diakses dari <http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava> pada 12 Nopember 2018.

hubungan saling menguntungkan dalam persahabatan, serta *good neighbourliness*. Kerjasama V4 berlanjut untuk mengeratkan demokrasi dan masyarakat sipil di Eropa Tengah.¹¹²

Visegrad Group dikenal sebagai simbol dari kesuksesan transformasi politik dan ekonomi, serta sebagai model kerjasama regional. V4 telah menjadi partner yang membangun, bertanggung jawab, dihormati di uni Eropa dalam mengimplementasikan prioritas dan program Uni Eropa yang ditunjukkan melalui berbagai input dan akan terus berlanjut dalam kontribusinya terhadap proses integrasi politik dan ekonomi di Eropa, termasuk pemekaran Uni Eropa dan NATO, dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan, keamanan dan stabilitas kawasan.¹¹³

V4 menyatakan akan berkontribusi aktif terhadap upaya internasional memerangi terorisme, perdagangan narkoba dan manusia, migrasi ilegal, ekstrimisme, serta ancaman dan tantangan keamanan lainnya, termasuk dalam area keamanan *cyber*. Selain itu, V4 memberikan perhatian penuh dalam menangani tantangan yang muncul karena perubahan iklim, mendukung perang melawan kemiskinan. Dalam menjalankan tujuan-tujuannya tersebut, V4 terbuka terhadap kerjasama yang didasarkan dengan nilai-nilai bersama dengan negara-negara atau grup regional lain dalam platform V4+.¹¹⁴

Berkaitan dengan krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Uni Eropa, negara-negara anggota V4 mengemukakan pernyataan yang dimuat dalam *Joint*

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

Statement yang dikeluarkan di Praha, Republik Ceko pada 15 Desember 2015.¹¹⁵

Dalam pernyataan bersama ini, V4 menekankan pada respon mereka atas peristiwa teror yang terjadi di Paris pada 13 Nopember 2015. V4 menyatakan simpatinya terhadap para korban, dan menyatakan siap untuk memberikan bantuan dan kerjasama yang diperlukan untuk Perancis.

Dalam beberapa *Joint Statement*, Polandia bersama negara anggota V4 menyatakan sikap yang menolak mengimplementasikan skema relokasi dan *resettlement* Uni Eropa dalam membantu Italia dan Yunani menangani krisis pengungsi. V4 berargumen bahwa, upaya utama yang harus dilakukan adalah dengan mengamankan perbatasan luar kawasan Uni Eropa. Hal ini untuk mencegah masuknya imigran ilegal, perdagangan manusia, serta terorisme.¹¹⁶

Polandia merupakan satu di antara empat negara anggota V4 yang sama sekali tidak menerima pengungsi melalui skema relokasi dan *resettlement* Uni Eropa sejak September 2015 sampai September 2017. Bukan berarti negara anggota lain menerima banyak. Justru di antara negara-negara anggota Uni Eropa, V4 merupakan negara yang sangat sedikit telah mengimplementasikan kebijakan ini.

Pada akhir kepemimpinan Ewa Kopacz sebagai Perdana Menteri, Polandia sempat menyatakan akan patuh terhadap kebijakan skema relokasi dan *resettlement* tersebut. Pernyataan yang dikritik oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Hingga pada saatnya pergantian Perdana Menteri Polandia, saat Beata Szydlo menjabat, Polandia kemudian mengalihkan keputusannya dengan menunda pengimplementasian kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintahan

¹¹⁵ Joint Statement of The Visegrad Group Countries, Praha, 15 Desember 2015 diakses dari <http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/joint-statement-of-the-151204> pada 13 Nop. 18

¹¹⁶ Ibid.

Beata Szydlo tidak menemukan solusi tersebut sebagai solusi terbaik bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Lebih jauh, Beata Szydlo menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk warga negaranya. Maka dari itu, Beata Szydlo menempatkan keamanan warga negaranya sebagai prioritas utama pemerintahan Polandia, dan hal ini seolah tidak dapat diintervensi oleh Uni Eropa.

Hungaria membangun pagar listrik berteknologi tinggi sebagai bentuk pengamannya di sepanjang perbatasannya. Pembangunan tersebut lebih diutamakan dibanding mengimplementasikan kebijakan Uni Eropa. Hal yang kemudian dikecam oleh UNHCR, badan internasional PBB yang menangani berbagai permasalahan pengungsi, pencari suaka, serta *displaced persons* di seluruh dunia.

V4 menyatakan akan terus mempertahankan perbatasan luar Eropa, termasuk dengan memberikan bantuan praktis kepada negara-negara yang terdampak luapan migrasi, khususnya negara-negara di kawasan Balkan. V4 menekankan pada pengefektifan perlindungan perbatasan eksternal dengan mengoptimalkan agensi Frontex di titik-titik tertentu, termasuk dengan fungsi penahanannya, prosedur suaka yang lebih efektif, serta peraturan pendaftaran aplikasi dan sidik jari yang teliti. Untuk itu, V4 menyatakan akan mengutus sebanyak 300 ahli untuk FRONTEX dan EASO.¹¹⁷

5.1.2. FAKTOR SITUASIONAL: EKSTERNAL (KRISIS)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator krisis dengan menghubungkannya dengan krisis keamanan yang menjadi salah satu pertimbangan Polandia dalam memutuskan penolakan pengungsi pada masa

¹¹⁷ Ibid.

pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Penulis memandang bahwa Polandia menggunakan serangan-serangan yang terjadi di kawasan Uni Eropa sebagai legitimasi untuk tidak menerima pengungsi, walaupun berarti tidak melaksanakan mandat Uni Eropa yang terkandung dalam kebijakan skema relokasi dan *resettlement*.

Pada tahun 2015 ketika Polandia menyatakan persetujuannya terhadap skema relokasi pengungsi. Polandia bersiap untuk menerima sekitar 400 pengungsi pada tahun tersebut, dan sisanya akan dilakukan bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.¹¹⁸ Sampai kemudian pada waktu dimana terjadi serangan teroris di Brussels, Belgia yang membuat Polandia menyatakan sikapnya untuk tidak melakukan relokasi pengungsi. Polandia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang belum melakukan relokasi pengungsi bahkan satu orang pun di bawah skema relokasi dan *resettlement*. Mereka menjadikan serangan tersebut sebagai alasan mengapa menerima pengungsi merupakan ancaman bagi negaranya. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Perdana Menteri Polandia, Beata Szydlo, yang menyatakan bahwa dengan terjadinya peristiwa serangan tersebut, Ia tidak melihat adanya kemungkinan untuk menerima pengungsi di Polandia.¹¹⁹

Hal senada juga kemudian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Polandia, Mariusz Blaszczak “*In agreeing to take in refugees, the (previous*

¹¹⁸ Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local Responses to the Refugee Crisis in Poland*, halaman 7, diakses dari http://www.forintegration.eu/uploads/drive/publikacje/local_poland.pdf pada 25 Nopember 2018.

¹¹⁹ Ibid.

government) put a ticking bomb under us". "We're defusing that bomb".¹²⁰

Sebuah pernyataan yang menunjukkan kritik terhadap pemerintahan sebelumnya yang menyetujui skema relokasi dan *resettlement* dari Uni Eropa tersebut.

Latar belakang pengungsi yang mayoritas merupakan Muslim menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat Polandia. Mereka dianggap dapat membawa masalah dalam masyarakat Polandia yang cenderung homogen. Mengenai hal tersebut, pemimpin partai PiS dengan tegas menyampaikan bahwa Polandia sama sekali tidak perlu untuk mengadopsi model sosial mereka untuk meraih kemajuan di bidang pembangunan kebarat-baratan. Kondisi masyarakat Polandia yang homogen dengan demografi berkulit putih kemudian menganut Katholik Roma merupakan nilai-nilai yang menurutnya harus dipertahankan.¹²¹ Kaczynski dalam pernyataan lain menyebutkan bahwa para pengungsi membawa banyak parasit dan protozoa yang bagi mereka tidak membahayakan, namun akan berbahaya di Polandia.¹²² Mariusz Blaszczak, Menteri Dalam Negeri Polandia menyatakan bahwa, "dengan membiarkan satu pengungsi saja memasuki Polandia, akan beresiko bagi perkembangan teroris. Polandia harus

¹²⁰ Jan Cieski, "Why Poland Doesn't Want Refugees", *Politico*, diakses dari <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/> pada 10 April 2018

¹²¹ Remi Adekoya, "Why Poland's Law and Justice Party Remains So Popular," *Foreign Affairs*, diakses 10 dari <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2017-11-03/why-polands-law-and-justice-party-remains-so-popular> pada 10 Juli 2018.

¹²² Jan Cieski, 'Migrants Carry "parasites and protozoa," warns Polish Opposition Leader,' *Politico*, diakses dari <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/> pada 28 September 2018.

mempertahankan peradaban Kristiani dari pejuang Islam yang mengancam untuk membunuh kita”.¹²³

Faktor aliansi dan krisis yang berasal dari sumber eksternal, penulis lihat berpengaruh terhadap kebijakan penolakan pengungsi oleh Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Hal ini terlihat dari keputusan-keputusan bersama yang diambil oleh *Visegrad Group*, di mana Polandia sebagai salah satu anggotanya. Dari faktor krisis, Polandia menjadikan serangkaian serangan di Eropa sebagai krisis keamanan dan menjadi alasan untuk tidak menerima pengungsi.

5.2. *Societal and Governmental Sources (Sumber Internal)*

Societal and Governmental sources mengacu pada faktor-faktor internal yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga faktor atau variabel dalam sumber internal yang penulis nilai relevan untuk menjelaskan keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia pada masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Variabel-variabel tersebut diantaranya, variabel *Culture and History*, *Moods of Opinion*, dan Akuntabilitas Politik.

5.2.1. *CULTURE AND HISTORY*

Pada tahun 966, pemimpin Polandia pada masa itu, Mieszko memilih untuk melakukan pembaptisan dirinya menjadi seorang kristiani, yang kemudian diikuti oleh seluruh bangsa Polandia.¹²⁴ Bentuk pengadopsian Kekristenan Roma

¹²³ Bartosz Brzeziński, "Poland, History, And The Refugee Crisis: Warsaw's Response Calls For A Sobering Look To The Past," *Voxeurop*, diakses dari <https://voxeurop.eu/en/2017/poland-and-refugee-crisis-5121327> pada 28 September 2018.

¹²⁴ Lukasz Kaminski dan Maciej Korkuc, *A guide to the history of Poland* (Krakow: Instytut

atau *Western Christianity* merupakan hal yang penting bagi Polandia untuk kemudian menjadi bagian dari peradaban barat.¹²⁵ Disamping itu, Polandia menjadi berada di bawah lindungan Paus.¹²⁶ Sejarah tersebut menjadi titik penting bagi Polandia dengan identitasnya sebagai *The Christ of Nations*, negara kristus.¹²⁷

Pada tahun 1630, Polandia berhasil menghentikan invasi Kekaisaran Turki yang kemudian melekatkan Polandia sebagai Benteng Kekristenan Eropa.¹²⁸ Selain itu, pasukan Polandia di bawah pimpinan King Jan III Sobieski memberikan bantuan kepada Kekaisaran Suci Roma dalam penghentian pengepungan Kekaisaran Islam Turki atas Vienna yang berakhir dengan kemenangan Polandia dan akhir bagi Kekaisaran Turki.¹²⁹ Pejuang Kristen, Pelindung Perbatasan Timur dari kaum *non-believer*, menjadi sebuah kontruksi yang melekat berabad-abad pada Polandia. Sehingga identitas nasional dengan agama sebagai dasar konstruksinya terbentuk di Polandia.¹³⁰ Tidak sampai di situ, pada tahun 1920 Polandia kemudian menunjukkan keberhasilannya dengan meruntuhkan kekuatan pasukan Bolshevik di perbatasan Warsawa sebagai upaya

Pamięci Narodowej, 2016), halaman 9.

¹²⁵ Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland: History of Poland-Timeline. Diakses pada 25 Agustus 2018 melalui <http://www.galiciajewishmuseum.org/>.

¹²⁶ "Learn the History of Poland in 10 Minutes," Culture.PL, diakses 26 Agustus 2018, <https://culture.pl/en/article/learn-the-history-of-poland-in-10-minutes>.

¹²⁷ "Polskosc: The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles," University of Oxford Faculty of Law, diakses 12 Juli 2018, <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centrecriminology/centreborder-criminologies/blog/2018/02/polskosc-legacy>.

¹²⁸ Lukasz Kaminski dan Maciej Korkuc, A guide to the history of Poland (Krakow: Instytut Pamięci Narodowej, 2016), 32.

¹²⁹ Educational Materials for International Student Tours to Holocaust Sites in Poland: History of Poland-Timeline. Diakses 25 Agustus 2018 melalui <http://www.galiciajewishmuseum.org/>.

¹³⁰ M. Polskość, Klajn. *The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles*. Diakses dari <https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/01/Polskosc-legacy> pada 9 Juli 2018.

melindungi Eropa, di mana revolusi dari pasukan Bolshevik di Eropa merupakan ancaman akan menghancurkan identitas Eropa dan budayanya.¹³¹

Pembentukan pandangan dan perspektif masyarakat Polandia tentang Eropa Barat, Kristen, dan budaya latin sebagai pusat peradaban dengan dijunjungnya nilai-nilai kebebasan, tidak terlepas dari peran dari elit politik Polandia saat itu. Penggambaran peran krusial Polandia sebagai pelindung nilai-nilai tersebut dari ancaman yang datang dari Rusia khususnya, tidak begitu berhasil dikarenakan masih sedikitnya masyarakat pada masa tersebut yang memiliki akses pengetahuan, di samping disebabkan oleh terpecahnya sistem pendidikan pada masa itu karena peran Austria, Jerman, dan Rusia yang menguasai beberapa daerah Polandia.¹³²

Pengakuan sebagai kerabat dari negara-negara Eropa Barat didapatkan oleh Polandia pasca perang dunia I selepas kemenangannya atas pasukan Bolshevik Uni Soviet. Bersama dengan itu, Polandia yang pro terhadap peradaban Barat, budaya Latin, serta penanaman nilai-nilai keberanian, keimanan Kristiani, serta loyalitas pada Eropa menjadi hal yang membuat Polandia mendapatkan pengakuan tersebut.

Perjalanan identitas Polandia tidak berjalan stagnan. Bahkan ada masa Polandia yang telah menjadi benteng Eropa dari pengaruh nilai-nilai asing, ditinggalkan atau dikucilkan oleh Eropa. Hal ini ditandai dengan pengabaian negara-negara Eropa saat Polandia diserang oleh Rusia dan Jerman. Selain itu,

¹³¹ Mach Zdzislaw, "Polish National Culture and its Shifting Centres", Centre for European Studies Journal (2000). Halaman 1, www.humanityinaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf

¹³² Ibid.

saat Polandia menjadi masuk pengaruh Uni Soviet, negara-negara Eropa menyetujuinya. Tidak akan mengherankan jika pada saat itu Polandia merasakan kekecewaan terhadap Eropa.

Beradanya Polandia di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet menyebabkan hubungan antara Polandia dengan Eropa terputus. Memunculkan pandangan terhadap Polandia yang dinilai jauh dari nilai-nilai Eropa yang berkeyakinan, cenderung mapan, serta demokratis. Polandia dianggap sebagai negara timur komunis, krisis perekonomian, pelanggaran HAM, dan bahkan atheis.¹³³

Untuk membuka ruang bagi Polandia agar bisa bergabung ke Uni Eropa, slogan *Return to Europe* muncul, didukung oleh peristiwa runtuhnya kekuasaan komunis Uni Soviet sekitar tahun 1989. Slogan yang merupakan bagian dari agenda Polandia untuk memperbaiki citra di masyarakat Eropa, yang juga dipengaruhi oleh sejarah yang selama ini diyakini Polandia.¹³⁴

Seperti yang penulis kutip sebelumnya bahwa Polandia menggambarkan dirinya sebagai pelindung Eropa, masyarakat Eropa, umat Kristen, serta budaya Latin dari ancaman budaya lain yang masuk. Suatu nilai yang mulai terbentuk sekitar abad ke 19 antara tahun 1830-1863, saat mayoritas masyarakat Polandia anti terhadap militer Rusia.

Pada abad ke 19, saat perang Napoleon, sebagaimana Polandia menggambarkan Perancis sebagai simbol peradaban Eropa, Polandia mendukung Perancis dalam perang tersebut, dengan tujuan kemerdekaan Polandia bisa diraih

¹³³ Ibid, halaman 6.

¹³⁴ Ibid, halaman 1-2.

kembali saat Perancis mengalami kemenangan. Gambaran yang berseberangan disematkan kepada Rusia sebagai simbol masyarakat barbar. Dalam hal ini, sejarah mitologi Polandia yang kemudian menjadi identitas politik Polandia tidak terlepas dari peran seniman, baik musik, rupa, literatur, serta teater yang mengangkat peperangan ini ke dalam karya seni mereka.¹³⁵

Pada masa itu, karya seni merupakan salah satu media yang berperan besar dalam proses pembentukan identitas nasional Polandia. Beberapa seniman yang dianggap paling berperan dengan karyanya yang mengenalkan bagaimana kisah kepahlawanan pasukan Polandia dalam melindungi Eropa diantaranya, pelukis bernama Wojciech Kossak, Piotr Michalowski dan Juliuz, penulis bernama Adam Mickiewicz. Salah satu pelukis yang sangat terkenal dalam mempengaruhi masyarakat Polandia adalah Matejko, karyanya dianggap berkontribusi dalam menjelaskan hubungan Polandia dan Eropa. Salah satunya, sebuah lukisan yang menunjukkan peran besar Polandia pada Perang Vienna sebagai bentuk kontribusi Polandia kepada masyarakat Eropa dan Kristen, dengan melindungi peradaban dan keyakinannya.¹³⁶

Menurut Mach, dengan melihat hubungan Polandia dengan Eropa, menjadi bisa dipahami mengapa pengabaian terhadap Polandia bisa terjadi. Kesan bahwa Polandia yang lebih membutuhkan Eropa, namun tidak demikian dengan Eropa membutuhkan Polandia menunjukkan pola hubungan asimetris antara keduanya. Selain itu, pengaruh Eropa terhadap Polandia dilihat lebih besar dibanding sebaliknya, sehingga memunculkan pandangan bahwa Polandia sebagai

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid, halaman 3.

negara *periphery* di kawasan Eropa. Legitimasi tersebut kemudian semakin didukung dengan faktor bahasa yang digunakan Polandia. Bahasa yang tidak cukup populer di kawasan Eropa, jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti Jerman, Perancis, dan Italia yang tersebar baik regional dan internasional.¹³⁷

Rakyat Polandia tidak kehilangan ideologinya walaupun berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pandangan bahwa Eropa sebagai pusat peradaban, sedangkan Uni Soviet yang dipandang bersifat barbar dan primitif masih dipegang oleh rakyat Polandia. Walaupun komunis Polandia pada saat itu membentuk dua pusat fokus dalam bidang ekonomi dan politik yang merekonstruksi konsep pemilihan pemimpin daerah, kekuasaan, birokrasi, properti.¹³⁸

Di sisi lain, Uni Soviet dan negara-negara timur lain memiliki pandangan berbeda terhadap Polandia yang cukup baik dalam mencampurkan antara budaya Eropa Barat dan Timur dengan cukup strategisnya letak negara. Dengan itu, Polandia dipandang sebagai sumber peradaban. Ketika suatu negara merasa bahwa mereka adalah negara *core*, perlakuan terhadap negara *periphery* terlihat cenderung serupa. Misalnya saat Polandia lebih banyak menyebutkan negara-negara Eropa Barat dalam sejarahnya daripada negara-negara Timur seperti Ukraina atau Lithuania, sedangkan Jerman pun sangat sedikit menyebut Polandia dalam sejarahnya. Jerman di mata Polandia merupakan negara yang ambisius terhadap kekuasaan, bahkan Polandia pernah mengalami konfrontasi dengan Jerman. Di sisi lain, Jerman juga merupakan rujukan akan peradaban Barat.¹³⁹

¹³⁷ Ibid, halaman 6.

¹³⁸ Ibid, halaman 8.

¹³⁹ Ibid, halaman 10.

Dengan rekam jejak Polandia dengan identitas yang dibangun sebagai pelindung Eropa, rakyat Polandia pada masa itu masih menyimpan harapan besar untuk dapat menjalin hubungan lagi dengan Eropa. Rekam jejak tersebut seharusnya layak mendapatkan apresiasi dan perlakuan yang lebih baik lagi dari negara-negara Eropa, mengingat apa yang telah Polandia lakukan selama ini.¹⁴⁰

Runtuhnya kekuasaan Uni Soviet pada tahun 1989 yang juga ditandai dengan turunnya Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Rusia, memunculkan slogan politik *Return to Europe* di Polandia. Sebuah slogan yang bertujuan untuk menunjukkan kepada negara-negara Eropa tentang keinginan Polandia untuk berkontribusi di dalam Uni Eropa.¹⁴¹

Langkah cepat dilakukan Polandia dengan mendatangi konferensi PBB pada tanggal 25 September 1989 oleh Krzysztof Skubizewski yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Hal ini dilakukan untuk melegitimasi pernyataan Polandia bersedia kembali ke Eropa. Kemudian Perdana Menteri Polandia Mazowiecki, pada rapat dewan negara-negara Eropa 30 Januari 1990 menyatakan bahwa Polandia memegang teguh nilai kebebasan, demokrasi, pluralisme, dan HAM, sebagai legitimasi bahwa Polandia memenuhi syarat untuk menjadi bagian atau anggota Uni Eropa.¹⁴²

Di masa kini, terjadi pergeseran antara pemikiran Polandia terhadap Eropa. Dari sudut pandang Polandia, terdapat perbedaan antara konsep Barat pada

¹⁴⁰ Ibid, halaman 8.

¹⁴¹ Ibid, halaman 10.

¹⁴² Ibid, halaman 11.

masa dulu dan sekarang dimana saat ini Eropa dinilai sudah tidak memenuhi kriteria negara Katholik, bergeser menjadi liberal.¹⁴³

Polandia merupakan negara anggota Uni Eropa yang memiliki agenda khusus yaitu menanam dan menumbuhkan kembali nilai-nilai yang menurutnya dulu ada di pusat Eropa. Dibandingkan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, Polandia merupakan negara yang cukup kuat mempertahankan identitas nasionalnya. Jikapun terdapat perbedaan nilai atau bisa dikatakan terdapat kontradiksi antara nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai yang dipegang Polandia, maka nilai-nilai nasionalnya yang akan dipilih.¹⁴⁴

Polandia sangat kuat dalam mempertahankan nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai atau dogma agama, hal yang kemudian mengalami perubahan di negara-negara Eropa. Menurut Polandia, perubahan-perubahan tersebut mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai sebelumnya dikarenakan pada sebelumnya, referensi utama dalam pembuatan keputusan bersumber dari ajaran Katholik.¹⁴⁵

Jika dikaitkan dengan peristiwa krisis pengungsi pada tahun 2015-2017, di mana mayoritas pengungsi beragama Muslim dan datang dari negara-negara yang notabene Islam, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi Polandia untuk menolak pengungsi dikarenakan perbedaan-perbedaan tersebut, di samping pengalaman sejarah Polandia yang pernah berkonfrontasi secara langsung dengan Kekaisaran Turki sebagai bentuk perjuangan melindungi Eropa dari nilai-nilai

¹⁴³ Ibid, halaman 12.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid, halaman 14.

asing. Selain itu, Polandia yang homogen dari segi etnis juga menjadi alasan dibalik penolakan pengungsi tersebut.

5.2.2. *MOODS OF OPINION*

Variabel ini berkaitan dengan survei atau poling yang dilakukan untuk melihat bagaimana opini publik masyarakat suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis akan menampilkan polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey yang penulis dapat dari website resminya. Dari data yang ditampilkan, akan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat atau publik Polandia menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan krisis pengungsi.

Dewan Uni Eropa memutuskan untuk mengadopsi mekanisme darurat untuk merelokasi pengungsi dari Yunani dan Italia ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dikarenakan peningkatan jumlah pengungsi yang memasuki Eropa melalui Yunani dan Italia pada bulan September 2015. Pertama kalinya dalam sejarah, suatu keputusan dari forum ini dibuat berdasarkan suara mayoritas, bukan suara bulat.¹⁴⁶

Beberapa negara anggota Uni Eropa menyambut dengan buruk kebijakan ini karena dinilai mencederai kedaulatan negara anggota. Walaupun demikian, mayoritas dari negara anggota Uni Eropa telah berkomitmen untuk merelokasi beberapa pengungsi sesuai dengan quota masing-masing yang ditentukan. Sejak diterbitkannya kebijakan ini, Polandia dan Hungaria tidak merelokasi seorang pun pengungsi.¹⁴⁷

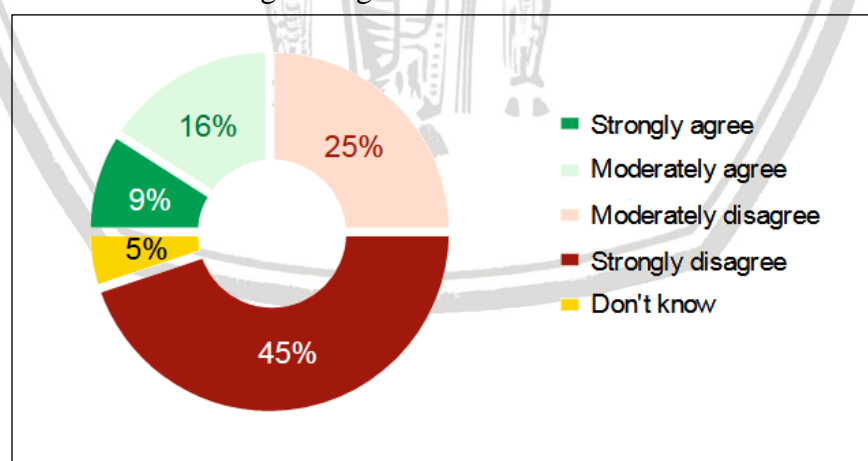
¹⁴⁶ Polish Public Opinion Research Center, diakses dari https://cbos.pl/EN/publications/reports/2017/065_17.pdf pada 27 Nopember 2018.

¹⁴⁷ Ibid.

Publik Polandia secara konsisten terlihat skeptis terhadap relokasi pengungsi yang mayoritas berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang memasuki kawasan Uni Eropa. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas dari pengungsi datang dari negara-negara dengan latar belakang Islam yang dominan.¹⁴⁸ Penulis melihat bahwa pernyataan tersebut menunjukkan pandangan masyarakat Polandia tentang Islam yang dinilai kurang baik yang kemudian berdampak pada stigma negatif tentang pengungsi.

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh *Polish Public Opinion Research* (CBOS), pertanyaan pertama menanyakan seputar setuju atau tidak bahwa Polandia harus menerima pengungsi dari negara-negara Muslim. Hasil survey menunjukkan sebanyak 9% sangat setuju bahwa Polandia harus menerima pengungsi dari negara Muslim, 16% agak setuju, kemudian 25% menyatakan agak tidak setuju, lalu 45% menyatakan sangat tidak setuju, dan 5% menjawab tidak tahu.¹⁴⁹

Grafik 5.1. Presentase Opini Publik Polandia tentang Penerimaan Pengungsi dari Negara-negara Muslim tahun 2017



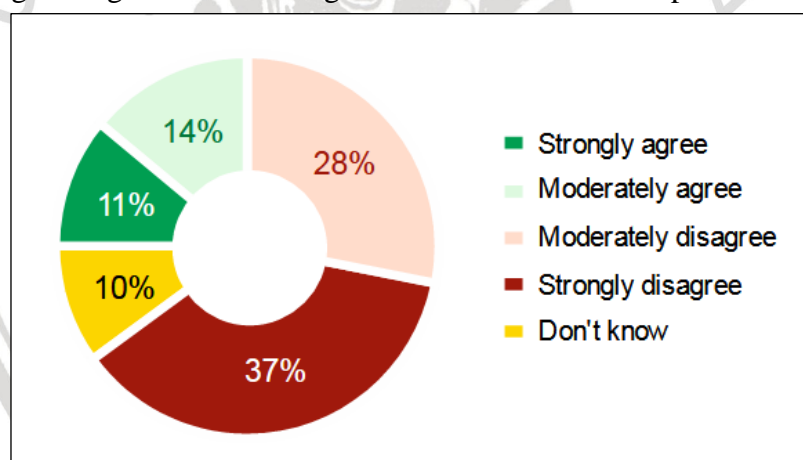
Sumber: *Polish Public Opinion Research Center*

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

Kemudian, pertanyaan yang lebih spesifik tentang apakah Polandia harus menerima pengungsi dari negara-negara Muslim, dan jika menolak maka Polandia akan dihadapkan pada resiko kehilangan bantuan keuangan dari Uni Eropa. 11% menyatakan sangat setuju untuk menerima pengungsi dari negara-negara Muslim, 14% agak setuju, 28% agak tidak setuju, 37% menyatakan sangat tidak setuju, dan 10% menjawab tidak tahu.¹⁵⁰ Hasil polling tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan presentasi persetujuan publik terhadap pernyataan bahwa Polandia harus menerima pengungsi dari negara-negara Muslim dan penurunan presentasi ketidaksetujuan publik atas pernyataan tersebut. Walaupun demikian, publik yang menyatakan ketidaksetujuannya masih menjadi mayoritas, terlebih jika digabungkan dengan yang menyatakan agak setuju.

Grafik 5.2. Presentase Opini Publik Polandia tentang Penolakan Pengungsi dari Negara-negara Muslim dengan Resiko Sanksi Uni Eropa tahun 2017



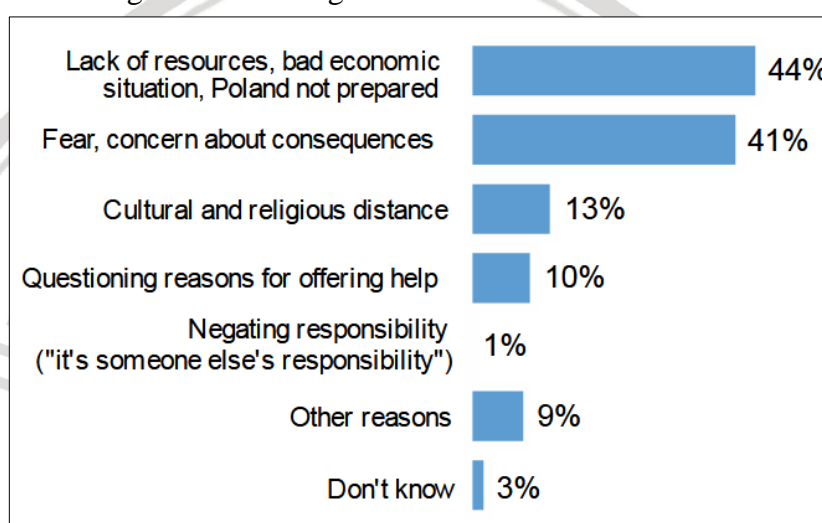
Sumber: *Polish Public Opinion Research Center*

Selanjutnya, justifikasi paling umum mengapa Polandia seharusnya tidak menerima pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Pertama, kurangnya sumber daya dan kesiapan sehingga mustahil untuk menolong pengungsi. Lalu, pandangan terhadap pengungsi sebagai ancaman seperti Islamisasi Polandia dan

¹⁵⁰ Ibid.

Eropa, terorisme, kejahatan, serta kompetisi di pasar tenaga kerja dan konflik sosial. Sebesar 44% beranggapan bahwa Polandia kekurangan sumber daya dan kesiapan, 41% atas dasar ketakutan atau berfokus pada konsekuensi, 13% karena perbedaan budaya dan agama, 10% menanyakan alasan menawarkan pertolongan, 1% menyatakan bahwa itu tanggung jawab orang lain, 9% alasan lainnya atau tidak spesifik, dan 3% menjawab tidak tahu.¹⁵¹

Grafik 5.3. Opini Publik tentang Justifikasi Penolakan Pengungsi dari Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara tahun 2015



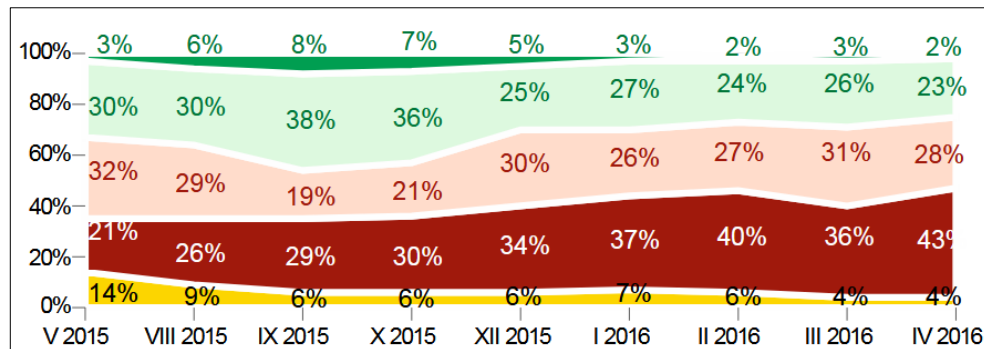
Sumber: *Polish Public Opinion Research Center*

April 2016, pernyataan sikap terhadap penerimaan pengungsi di Polandia semakin memburuk. Hal ini berkaitan dengan serangan teror di Eropa pada waktu itu. Sejak tahun 2015, tingkat keterbukaan terhadap pengungsi yang terdampak konflik militer berada pada tingkat terendah. Pada saat itu, sepertiga masyarakat Polandia beranggapan bahwa Polandia harus menawarkan setidaknya tempat perlindungan sementara. Mayoritas dari kelompok ini berpikir bahwa pengungsi harus diberikan hak untuk tinggal sampai mereka bisa kembali ke negara asalnya.

¹⁵¹ "Attitude to Refugees", *Polish Public Opinion Research Center*, diakses dari https://cbos.pl/EN/publications/reports/2015/133_15.pdf pada 27 Nopember 2018.

Sedangkan di sisi lain, hanya sedikit yang beranggapan bahwa pengungsi harus mendapatkan hak untuk tinggal dan menetap di Polandia.¹⁵²

Grafik 5.4. Opini Publik Polandia terhadap Penerimaan Pengungsi dari tahun 2015 sampai pasca Serangan Brussel tahun 2016



Sumber: Polish Public Opinion Research Center

Setelah 2 tahun program atau skema relokasi dan *resettlement* pengungsi ke negara-negara Eropa yang tiba di Italia dan Yunani, pada 26 September 2018 selesai dan tidak diperpanjang. Selanjutnya, meskipun pengungsi tidak lagi menjadi subjek yang dalam relokasi, mereka dapat diterima dengan prinsip sukarela. Secara umum, negara-negara Uni Eropa hanya menerima sedikit dari jumlah pengungsi daripada jumlah yang diberikan. Polandia dan Hungaria sama sekali tidak berpartisipasi dalam relokasi tersebut.¹⁵³

Polandia secara umum menolak pengungsi, khususnya yang datang Timur Tengah dan Afrika. Namun, sikap terhadap warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik bersenjata sangat berbeda. Mayoritas responden bersedia untuk menerima mereka, dan skala penerimaan tersebut semakin meningkat. Sedikit berbeda dengan warga Ceko dan Slovakia yang lebih kritis tentang hak atau izin

¹⁵² "Attitude to Migration Crisis after Brussels Attacks", Polish Public Opinion Research Center, diakses dari https://cbos.pl/EN/publications/reports/2016/069_16.pdf pada 27 Nopember 2018.

¹⁵³ "Attitude to Receiving Refugees", Polish Public Opinion Research Center, diakses dari https://cbos.pl/EN/publications/reports/2017/163_17.pdf pada 27 Nopember 2018.

pengungsi daripada Polandia, dan perbedaan mendasar secara umum adalah mereka tidak bersedia untuk menerima warga negara Ukraina.¹⁵⁴

Berdasarkan survey Pew Research Center, di antara 10 negara Uni Eropa yang disurvei, Polandia menempati urutan teratas di antara negara-negara yang menganggap pengungsi yang berasal dari Suriah dan Iraq sebagai ancaman terhadap negaranya. Sebanyak 73% warga Polandia beranggapan demikian, disusul oleh Hungaria dan Yunani dengan 69%. Selanjutnya, Polandia juga masuk ke dalam 6 besar negara-negara yang tidak puas atau tidak setuju dengan bagaimana Uni Eropa menangani krisis migrasi yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan presentase sebanyak 71%. Sedangkan Yunani berada di urutan teratas dengan presentase 94%.¹⁵⁵

5.2.3. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Variabel ini menjelaskan bagaimana struktur pemerintahan dalam suatu negara, kemudian dengan variabel ini penulis berusaha untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dari struktur pemerintahan tersebut terhadap keputusan penolakan pengungsi Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Dalam menjelaskan variabel ini, penulis juga menampilkan isi yang berkaitan dengan variabel akuntabilitas politik, karena dalam kurun waktu tersebut, pemerintahan Polandia mengalami perubahan pemegang kekuasaan, baik di ranah eksekutif maupun yudikatif.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Jacob Poushter, "European opinions of the refugee crisis in 5 charts", *Pew Research Center*, 16 September 2016, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/> (diakses pada 20 Juli 2017).

Berdasarkan data hasil pemilihan umum dari periode tahun 2001 sampai 2015, belum ada partai yang berhasil meraih kursi mayoritas dalam pengertian partai tersebut dapat menjalankan pemerintahan tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain. Berbeda dengan tahun 2015, pertama kalinya dalam sejarah Polandia setelah lepas dari kekuasaan Uni Soviet dan kemudian menjalankan pemerintahan demokratis, sebuah partai dapat meraih kursi terbanyak dalam parlemen melebihi kuota yang harus dicapai untuk dapat menghasilkan keputusan dalam pemerintahan.

Law and Justice Party (PIS) meraih mayoritas suara dengan presentasi 37, 6% yang kemudian mendapatkan kursi di Sejm sebanyak 235 kursi. Sejm terdiri dari 460 kursi yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang adil, tepat dan proporsional, dan harus diselenggarakan dengan pemungutan suara secara rahasia.¹⁵⁶

Menurut Konstitusi Polandia, Presiden merupakan wakil tertinggi Polandia dan sebagai penjamin keberlangsungan otoritas negara. Presiden memiliki masa jabatan 5 tahun, berbeda dengan parlemen yang hanya memiliki masa jabatan 4 tahun.¹⁵⁷ Pada pasal 154 Konstitusi Polandia 1997 disebutkan bahwa Presiden Polandia harus menominasikan seorang Perdana Menteri yang dapat mengajukan komposisi dari Dewan Menteri dalam 14 hari sejak pertama Sejm menjalankan tugas atau sejak pengunduran diri dari Dewan Menteri sebelumnya.

¹⁵⁶ Chapter IV Sejm and Senate, The Constitution of The Republic of Poland 1 April 1997. Pasal 96 ayat 2

¹⁵⁷ The Constitution of The Republic of Poland, pasal 126-127.

Berkaitan dengan penelitian ini, terjadi hal yang menarik pada hasil pemilihan umum parlemen Polandia pada tahun 2015. Hal tersebut adalah raihan PiS di kursi pemerintahan baik Eksekutif maupun Yudikatif. Presiden Polandia yang terpilih pada pemilihan umum Presiden bulan Mei tahun 2015 merupakan kader dari partai PiS. Kemudian pada pemilihan umum parlemen Polandia bulan Oktober tahun 2015, kursi terbanyak di parlemen diraih oleh PiS. Dilanjutkan dengan pengajuan Beata Szydlo untuk menjadi Perdana Menteri Polandia oleh Andzrej Duda selaku Presiden Polandia, yang juga merupakan kader dari PiS.

Menurut pasal 146 ayat 1 tentang Dewan Menteri dan Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Perdana Menteri menjalankan perannya tentang urusan dalam negeri, dan kebijakan luar negeri Polandia. kemudian Perdana Menteri juga harus memastikan keamanan baik internal, serta kepentingan publik, serta keamanan eksternal negara.

Tabel. 5.1. Hasil Pemilihan Umum Parlemen Polandia tahun 2015

Registered Electors	30,629,150		
Total Votes	15,595,335	50.9%	
Valid Votes	15,200,671		
Party	Votes	%	Seats
Law and Justice (PiS)	5,711,687	37.6	235
Civic Platform (PO)	3,661,474	24.1	138
Kukiz'15 (K'15)	1,339,094	8.8	42
Modern (.N)	1,155,370	7.6	28
Polish Peasant Party (PSL)	779,875	5.1	16
German Minority	27,530	0.2	1
United Left (ZL)	1,147,102	7.5	0
KORWiN	722,999	4.8	0
Together	550,349	3.6	0
Others	105,191	0.7	0

Sumber: electionresources.org

Berdasarkan tabel hasil pemilihan umum parlemen Polandia tahun 2015 di atas, PiS meraih presentase suara sebesar 37, 6% dan mengamankan kursi di Sejm sebanyak 235. Di posisi kedua diraih oleh Civic Platform (PO) dengan raihan 24,1% dan memperoleh kursi sebanyak 138. Kemudian di urutan selanjutnya Kukiz'15, Modern, Polish Pleasant Party (PSL) meraih suara sebesar 8,8%, 7,6%, dan 5,1%, dengan raihan kursi sebanyak 42, 28, dan 16. Hasil ini menunjukkan bahwa PiS dapat menjalankan pemerintahan Polandia tanpa harus melakukan negosiasi dengan partai lainnya. Jikapun partai lain melakukan koalisi, tetap tidak bisa menyaingi jumlah suara dari PiS.¹⁵⁸

5.2.4. AKUNTABILITAS POLITIK

Dalam variabel ini, penulis akan membahas mengenai pengaruh dari pemerintahan Polandia yang dikuasai oleh partai *Law and Justice* yang memenangkan mayoritas suara pada pemilihan umum parlemen tahun 2015. Dalam buku karya James Hampshire yang berjudul *The Politics of Immigration* disampaikan bahwa di beberapa negara Eropa, partai dengan haluan sayap kanan telah memobilisasi sentimen anti-imigran, kemudian menggambarkan imigran, minoritas, khususnya Muslim sebagai ancaman terhadap budaya dan keamanan nasionalnya.¹⁵⁹

Hasil pemilihan umum parlemen Polandia tahun 2015 merupakan momen bersejarah. Pertama dalam sejarah demokrasi Polandia, ketika kemenangan suatu partai politik pemenang pemilu dapat membentuk pemerintahan tanpa harus melakukan negosiasi dengan koalisi yang terdapat di

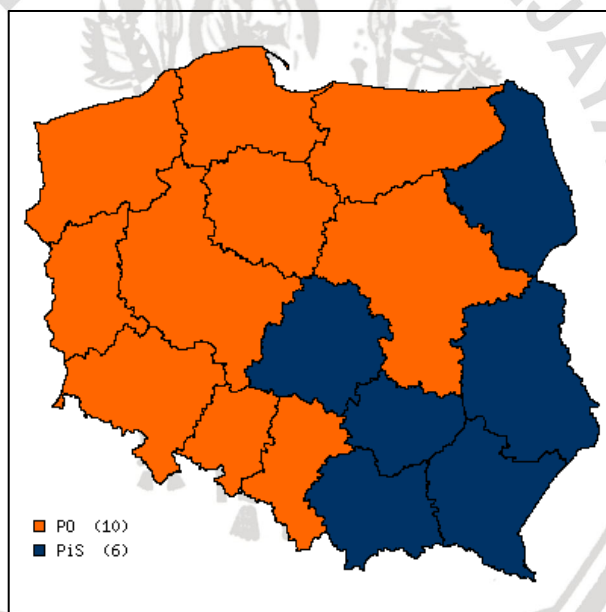
¹⁵⁸ Jerzy Jaskiernia, "The Development of the Polish Party System: a Perspective of the Parliamentary Elections Results", *Polish Political Science Yearbook*, vol. 46 (2) (2017), <https://www.researchgate.net/publication/322285954> diakses pada 25 Nopember 2018.

¹⁵⁹ James Hampshire, "The Politics of Immigration", Op., cit, halaman 25.

dalam pemerintahan.¹⁶⁰ Pada pemilu kali ini, Partai *Law and Justice* (PiS) meraih mayoritas perolehan suara dengan raihan 37,6%, kemudian *Civic Platform* (PO) yang notabene merupakan partai pemenang pemilu parlemen sebelumnya dengan raihan 24,1%.¹⁶¹

Kedua partai ini cenderung memiliki nilai yang berseberangan, *Civic Platform* (PO), dan *Law and Justice* (PiS). PO diibaratkan sebagai perwujudan dari tendensi liberal, sedangkan PiS dengan tendensi konservatif.¹⁶² PiS meraih kekuasaan dalam kurun waktu yang singkat pada tahun 2005 yang kemudian kandas oleh PO pada pemilu yang diselenggarakan lebih awal di 2007.

Gambar 5.2. Peta Perolehan Suara Pemilu Parlemen tahun 2011



Sumber: electionresources.org

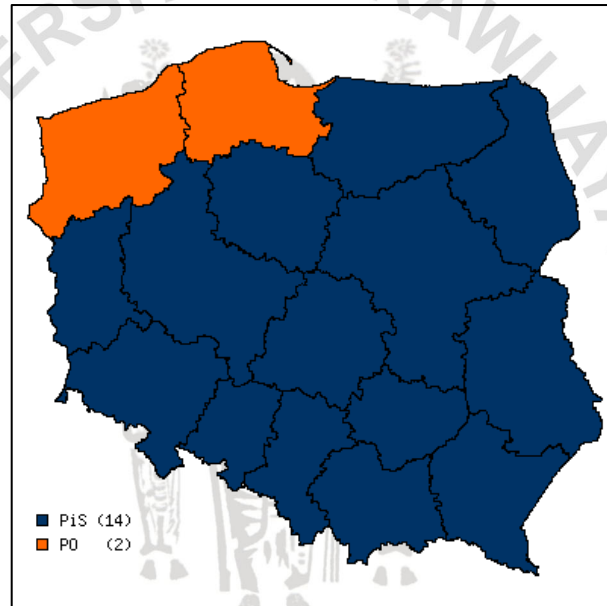
¹⁶⁰ Jerzy Jaskiernia, "The Development of the Polish Party System: a Perspective of the Parliamentary Elections Results", *Polish Political Science Yearbook*, vol. 46 (2) (2017), <https://www.researchgate.net/publication/322285954> diakses pada 25 November 2018.

¹⁶¹ 2015 General Election Results – Poland, diakses dari <http://electionresources.org/pl/sejm.php?election=2015> pada 25 November 2018.

¹⁶² Op,cit, The Development of the Polish Party System, halaman 232.

Peta perolehan suara mayoritas partai di setiap Provinsi Polandia. Pada tahun 2011, Civic Platform meraih sekitar 2/3 perolehan suara dengan didominasi Provinsi-provinsi yang secara letak geografis antara Barat-Tengah. Sedangkan PiS memenangkan suara mayoritas di Provinsi-provinsi dengan letak geografis antara Timur-Tengah, namun tidak begitu signifikan. Hasil ini membuat Civic Platform meraih kursi terbanyak di parlemen, walaupun dalam menjalankan fungsi pemerintahannya tidak menguasai pemerintahan secara penuh, melainkan bersama dengan partai lainnya.

Gambar 5.3. Peta Perolehan Suara Pemilu Parlemen tahun 2015



Sumber: electionresources.org

Berbeda dengan perolehan hasil pemilihan umum parlemen tahun 2011. Pada pemilihan umum parlemen tahun 2015, Civic Platform hanya mendapatkan mayoritas suara di 2 Provinsi, berbanding terbalik di periode sebelumnya dengan 10 Provinsi. Sedangkan PiS seolah mencapai puncak kepopulerannya dengan meraih perolehan suara mayoritas di 14 dari 16 Provinsi yang ada di Polandia.

Pada 10 April 2010, terjadi musibah yang mengguncang panggung perpolitikan Polandia saat pesawat kepresidenan Tupolev mengalami kecelakaan di daerah Smolensk Rusia.¹⁶³ Kecelakaan tersebut menewaskan semua penumpang pesawat, diantaranya Presiden Polandia saat itu, Lech Kaczynski¹⁶⁴ beserta Isterinya atau Ibu Negara Polandia, semua staf militer, gubernur bank nasional, semua kepala pendeta tentara, serta lebih dari 90 sosok perpolitikan penting. Saat itu sedang dilaksanakan kunjungan resmi untuk menghadiri upacara peringatan mengenang pembantaian yang dilakukan oleh Soviet terhadap tentara Polandia di Katyn.¹⁶⁵

Penulis melihat bahwa kemenangan PiS pada pemilihan umum parlemen tahun 2015 berdampak pada pengimplementasian nilai-nilai yang terdapat pada PiS terhadap pemerintahan Polandia. Hal ini dikarenakan PiS memperoleh suara mayoritas yang kemudian mendapatkan kursi mayoritas pula di baik di Sejm dan Senat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan Polandia pada saat itu dapat dijalankan oleh satu partai.

Krisis pengungsi menjadi salah satu topik utama sebelum pemilihan umum. Pemerintahan sebelumnya menyatakan setuju untuk menerima sekitar 7.000 pengungsi, sedangkan PiS sebagai partai oposisi pada saat itu, menyatakan sebaliknya.¹⁶⁶ PiS semenjak masa sebelum menduduki pemerintahan Polandia telah menunjukkan kecenderungannya untuk tidak menerima pengungsi, yang kemudian ditunjukan dengan fakta bahwa sampai tahun 2017, Polandia tidak

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Lech Kaczynski merupakan saudara kembar pemimpin PiS Jaroslaw Kaczynski

¹⁶⁵ Op. cit, *The Development of the Polish Party System*, halaman 233.

¹⁶⁶ Poland elections: Conservatives secure decisive win, BBC News, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-34631826> pada 10 April 2018.

mengimplementasikan mandat Uni Eropa tentang penanganan krisis pengungsi dengan kebijakan skema relokasi dan *resettlement*.¹⁶⁷

Di antara negara-negara anggota Uni Eropa, Polandia merupakan salah satu negara yang tidak mengimplementasikan mandat dari kebijakan skema relokasi dan *resettlement*. Setelah insiden serangan yang terjadi di Brussel Belgia, Beata Szydlo menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan lagi bagi Polandia untuk menerima pengungsi.¹⁶⁸ Menurut penulis, dapat dilihat dari salah satu pernyataan ini bahwa Polandia menganggap pengungsi sebagai ancaman bagi negaranya.

Kritik terhadap pemerintahan sebelumnya juga dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Polandia, Mariusz Blaszczak. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sebelumnya yang menyetujui penerimaan pengungsi sama halnya dengan menaruh bom waktu di negaranya. Maka dari itu, dengan menolak pengungsi, Ia beranggapan bahwa pemerintahan sekarang tengah menonaktifkan bom atau ancaman tersebut.¹⁶⁹

Dalam beberapa kesempatan, pemimpin partai PiS, Jaroslaw Kaczynski menyampaikan pandangannya terhadap pengungsi dan mengkritisi kebijakan Uni Eropa dalam penanganan krisis pengungsi. Bahkan menurut penulis, pernyataannya relatif terang-terangan untuk disampaikan, seperti “*migrants carry all sorts of parasites and protozoa, which while not dangerous in the organisms of these people, could be dangerous here.*” Maka dari itu, Kaczynski beranggapan

¹⁶⁷ Op. Cit, *Fifteenth Report on Relocation and Resettlement*.

¹⁶⁸ Anna Pilat dan Dominika Potkanska, *Local Responses to the Refugee Crisis in Poland*, halaman 7, diakses dari http://www.forintegration.eu/uploads/drive/publikacje/local_poland.pdf pada 25 Nopember 2018.

¹⁶⁹ Jan Cieski, “Why Poland Doesn’t Want Refugees”, *Politico*, diakses dari <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/> pada 10 April 2018

bahwa perlu untuk melakukan penolakan pengungsi dengan menolak pengimplentasian kebijakan skema relokasi dan *resettlement* sebagai mandat dari Uni Eropa kepada negara-negara anggota Uni Eropa dengan penentuan kuota.¹⁷⁰

Pemerintahan Polandia, dalam hal ini PiS yang mendominasi kursi di parlemen baik Sejm maupun Senat, dengan Presiden Andrzej Duda dan Perdana Menteri Beata Szydlo beserta jajaran kabinet mayoritas sama-sama berasal dari PiS, berupaya untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan akuntabilitas politik yang diembannya dimana hal tersebut tidak terlepas dari harapan pemilih pada saat pemilu untuk dapat diimplementasikan di pemerintahan Polandia.

PiS menyerukan peningkatan anggaran sosial, pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang kaya, dan merenasionalisasi sektor-sektor kunci dalam ekonomi. PiS dengan Jaroslaw Kaczynski sebagai pemimpin partainya menentang imigran, gay, feminis, liberal, dan kebanyakan nilai-nilai asing. Sebagai tambahan iya mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan Polandia yang hanya berkebangsaan Polandia, bukan keberagaman bangsa-bangsa.¹⁷¹

Berkaitan dengan krisis pengungsi di Uni Eropa, penulis melihat bahwa PiS memanfaatkan krisis pengungsi tersebut dengan cerdas. Di saat pemerintahan Polandia pada saat itu berfokus pada penanganan pengungsi mengacu pada proposal Uni Eropa tentang skema relokasi, PiS dengan tegas menentang usulan Uni Eropa tersebut. PiS beranggapan bahwa skema tersebut hanya akan meningkatkan jumlah pengungsi ke masing-masing negara. Lebih jauh, PiS

¹⁷⁰ Jan Cieski, 'Migrants Carry "parasites and protozoa," warns Polish Opposition Leader,' Politico, diakses dari <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/> pada 28 September 2018.

¹⁷¹ Op. cit, *The Development of the Polish Party System*, halaman 238.

menebarkan ketakutan tentang pengungsi dan imigran lainnya akan mengancam keamanan nasional, agama dan identitas budaya, ekonomi, dan bahkan kesehatan publik.¹⁷²

Setelah perang dunia 2, Polandia merupakan satu-satunya negara Eropa yang secara etnis dan agama paling homogen. Sekitar 87,5% masyarakat Polandia mengidentifikasi diri mereka sebagai Katholik Roma, yang kemudian memiliki arti bahwa hal tersebut tidak perlu berhadapan dengan tantangan-tantangan dari multikulturalisme. Meskipun demikian, Polandia telah menerima sekitar hampir 100.000 pengungsi perang dari Republik Ceko. Kemudian, beberapa tahun ke belakang, Polandia menerima sekitar setengah juta migran ekonomi dari Ukraina yang tidak banyak diketahui umum. Berita-berita tentang krisis pengungsi yang mendominasi pemberitaan di media-media, kemudian memunculkan seruan xenophobia khususnya di Polandia.¹⁷³

5.2.5. *ECONOMIC DEVELOPMENT*

Perekonomian Polandia merupakan delapan terbesar ekonomi di kawasan Uni Eropa, serta yang terbesar di antara negara-negara anggota Uni Eropa dengan latar belakang dulunya merupakan blok timur. Sejak 1990, Polandia mengembangkan kebijakan liberasi ekonomi, dan bahkan antara tahun 2007-2008, saat terjadi resesi ekonomi, Polandia merupakan satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang berhasil menghindari resesi ekonomi tersebut.¹⁷⁴

¹⁷² Ibid, halaman 237.

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Marcin Gocłowski, "Poland was a 'green island': GDP revision shows no recession occurred", *Reuters*, diakses dari <https://www.reuters.com/article/poland-growth-revision/poland-was-a-green-island-gdp-revision-shows-no-recession-occurred-> pada 12 Desember 2018.

Grafik 5.5. Tren GDP Polandia tahun 2008-2017 (per miliar dollar AS)



Sumber: Tradingeconomics.com | World Bank

Polandia diklasifikasikan sebagai negara dengan pendapatan ekonomi tinggi oleh *World Bank*, dimana Polandia menduduki peringkat 23 dunia terkait dengan GDP. Komponen terbesar dari perekonomian Polandia ditopang oleh sektor jasa sebesar 62,3%, industri 34,2%, serta agrikulture 3,5%. Dengan reformasi ekonomi pada tahun 1989, hutang luar negeri Polandia meningkat dari \$42,2 juta pada tahun 1989, menjadi \$365,2 juta pada 2014.¹⁷⁵

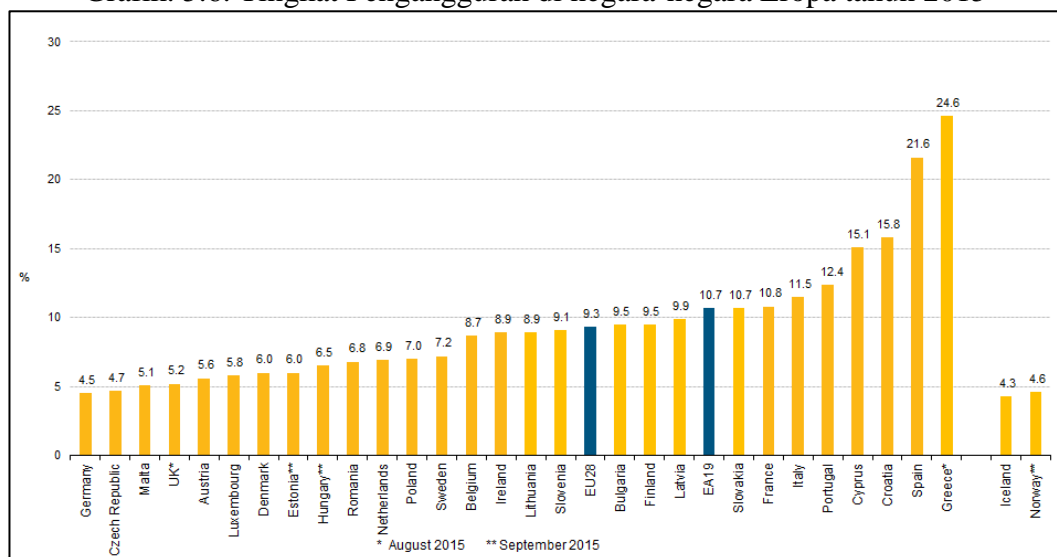
Berdasarkan Kantor Pusat Statistik Polandia, pada tahun 2010, tingkat pertumbuhan ekonomi Polandia adalah 3,7%, dimana merupakan salah satu yang terbaik di Eropa. Kemudian pada tahun 2014, perekonomiannya tumbuh sebesar 3,3% dan pada tahun 2015 tumbuh 3,8%. Walaupun pada tahun 2016 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan pengetatan pasar tenaga kerja pada akhir tahun tersebut dan mengakibatkan pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun 2017.¹⁷⁶ Bahkan, pada 29 September 2017, penyedia indeks

¹⁷⁵ WDI 2017 Maps – Data, *The World Bank*, diakses dari <https://data.worldbank.org/products/wdi-maps> pada 13 Desember 2018.

¹⁷⁶ Jacek Frączyk, "DP growth in Poland leaves Europe far behind. The latest Eurostat data", *Money.pl*, diakses dari <https://www.money.pl/gospodarka/unia->

ekuitas FTSE Russel mengumumkan bahwa status pasar Polandia telah meningkat dari pasar berkembang menjadi pasar maju.¹⁷⁷

Grafik. 5.6. Tingkat Pengangguran di negara-negara Eropa tahun 2015



Sumber: Eurostats

Pengangguran di Polandia mulai muncul beriringan dengan jatuhnya sosialisme. Tingkat pengangguran di Polandia pada akhir 1990an sebesar 10% dan kemudian mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2002, yakni sebesar 20%. Meskipun demikian, terjadi penurunan dari tahun ke tahun, dan bahkan sejak tahun 2008, tingkat pengangguran di Polandia secara konsisten berada di bawah rata-rata Eropa. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran di Polandia berada di bawah 8%, yang kemudian hal ini mengarah kepada kemungkinan kekurangan tenaga kerja.¹⁷⁸

europa/wiadomosci/artikul/wzrost-pkb-polski-unia-europejska-eurostat,168,0,2393000.html pada 13 Desember 2018

¹⁷⁷ Radio Poland, "FTSE Russell upgrades Poland from emerging to developed market", diakses dari <http://thenews.pl/1/12/Artykul/328269,FTSE-Russell-upgrades-Poland-from-emerging-to-developed-market> pada 13 Desember 2018.

¹⁷⁸ Eurostats, "Unemployment Statistics"

Dari pemaparan tentang variabel *economic development* di atas, penulis tidak menemukan adanya pengaruh dari variabel tersebut terhadap keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017. Jika dikatakan bahwa faktor ekonomi yang membuat Polandia menolak pengungsi, pada masa ini perekonomian Polandia sedang dalam kondisi baik, bahkan dari tingkat pengangguran juga termasuk dalam tingkat yang baik dimana berada di bawah rata-rata Eropa. Maka dari itu, dari data tersebut penulis menemukan bahwa variabel lain seperti struktur pemerintahan, akuntabilitas politik, serta faktor budaya dan sejarah yang mempengaruhi keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi.

5.3. *Idiosyncratic Sources (Sumber Internal)*

Sumber idiosincratik mengacu pada faktor-faktor internal yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, nilai-nilai, kepribadian, talenta, serta pengalaman pemimpin Polandia dalam hal ini Beata Szydlo selaku Perdana Menteri Polandia penulis paparkan untuk menjelaskan keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia pada masa pemerintahannya tahun 2015-2017.

5.3.1. *VALUES AND PERSONALITIES OF LEADER*

Pada akhir 2017, pemerintahan Polandia yang dikuasai oleh Partai *Law and Justice*, melakukan pergantian kepemimpinan pemerintahan Polandia, dikarenakan Beata Szydlo mengajukan pengunduran diri kepada Presiden dan disetujui. Kemudian, Mateusz Morawiecki ditunjuk untuk menjabat Perdana Menteri. Ia dianggap lebih dapat menjadi representatif partai yang lebih baik dan memiliki kredibilitas yang lebih baik dalam komunitas ekonomi dan politik

internasional. Lebih khusus, berbeda dengan pendahulunya, Mateusz Morawiecki tidak memiliki reputasi sebagai seseorang yang *euroskeptic*.¹⁷⁹ Dari sini penulis melihat bahwa terdapat nilai yang dapat ditemukan tentang Beata Szydlo di mana Ia dianggap memiliki reputasi sebagai seseorang yang *euroskeptic*. Namun demikian, hal ini tidak terlepas dari pengaruh partai pengusung Beata Szydlo dan juga Andrzej Duda yang juga dinilai memiliki reputasi *euroskeptic*.¹⁸⁰

Kaczynski merupakan seseorang dengan figur *divisive*. Ia tidak merasa takut untuk mengklaim bahwa lawan politiknya berada pada kubu komunis. tidak sampai di situ, berkaitan dengan pengungsi, Ia menyampaikan peringatan bahwa pengungsi-pengungsi membawa penyakit bersama mereka dari Timur Tengah.¹⁸¹ Pada suatu kampanye, Kaczynski menyampaikan hal yang sangat mendiskreditkan pengungsi, khususnya pengungsi Muslim. Ia menyampaikan bahwa penyakit-penyakit seperti kholera, disentri, serta parasit dan bakteri lainnya mungkin tidak berpengaruh kepada mereka, tetapi akan berbahaya di sini, Polandia.¹⁸²

Menurut penulis, menjadi tidak mengherankan mengapa Polandia bersikeras untuk tidak mengimplementasikan skema relokasi dan *resettlement* Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi sebagai bantuan solidaritas terhadap

¹⁷⁹ Anna Grzymala-Busse, "Poland's right-wing government has a new prime minister. Here are the 5 things you need to know" diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/12/12/polands-right-wing-government-has-a-new-prime-minister-here-are-the-5-things-you-need-to-know> pada 22 Nopember 2018.

¹⁸⁰ Poland country profile, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-17753718> pada 22 Nopember 2018.

¹⁸¹ Adam Easton, "Beata Szydlo: Polish miner's daughter set to be PM", *BBC NEWS*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-34619037> pada 22 Nopember 2018.

¹⁸² Jan Puhl, "Polish Elections: Law and Justice Party Regains Credibility by Dialing Down Rhetoric", diakses dari <http://www.spiegel.de/international/europe/beata-szydlo-revamps-polish-law-and-justice-party-ahead-of-elections-a-1058506.html> pada 22 Nopember 2018.

negara anggota Uni Eropa terdampak masifnya pengungsi yang memasuki kawasan Uni Eropa, yaitu Italia dan Yunani.

Selain nilai-nilai tersebut, Beata Szydlo menekankan pentingnya nilai-nilai tradisional Katolik Roma, dan kebutuhan untuk membantu kebanyakan orang yang tidak merasakan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Polandia yang impresif selama dua dekade terakhir. Ia memiliki pandangan terhadap ekonomi yang cenderung tentang percampuran antara kesejahteraan dan *laissez-faire*, yang menjadi asetnya selama kampanye, di tengah skala korupsi dan ketidakcekatan pemerintahan sebelumnya.¹⁸³

Berkaitan dengan krisis pengungsi, dalam beberapa kesempatan Beata Szydlo menyampaikan keengganannya untuk menerima pengungsi walaupun dalam arti lain tidak mengimplementasikan mandat yang diberikan Uni Eropa kepada setiap negara anggota sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam kebijakan skema relokasi dan *resettlement*.

Beata Szydlo menyampaikan bahwa tanggung jawab pemerintahan adalah untuk warga negaranya sendiri. Jikapun membantu, Polandia menyatakan bersedia memberikan bantuan tetapi bukan di dalam kawasan, melainkan di luar kawasan dalam bentuk kerjasama atau pemberian bantuan kepada negara ke tiga untuk mengatasi krisis pengungsi.

Beata Szydlo menjadikan serangkaian serangan yang terjadi di beberapa kota di negara-negara anggota Uni Eropa sebagai salah satu alasan untuk tidak menerima satupun pengungsi. Selain itu, ia menyampaikan bahwa serangan

¹⁸³ Adam Easton, "Beata Szydlo: Polish miner's daughter set to be PM", Op, cit.

tersebut terjadi karena beberapa negara Eropa membuka dirinya untuk menerima pengungsi. Penulis melihat bahwa Beata Szydlo melihat pengungsi sebagai ancaman, nilai yang hampir sama seperti yang disampaikan Kaczynski sebagai pemimpin partai *Law and Justice*.

5.3.2. TALENTS AND EXPERIENCES OF LEADER

Beata Szydlo sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Polandia, Ia merupakan ketua tim kampanye pemenangan Andrzej Duda sebagai Presiden Polandia. Selain itu, Szydlo merupakan walikota Brzeszcze (Silesia) sejak tahun 2005.¹⁸⁴ Beata Szydlo merupakan Perdana Menteri wanita ke tiga di Polandia. Ia memegang misi mengimplentasikan reformasi sosial di bidang pemukiman, pendidikan, layanan kesehatan, pensiunan, ekonomi, bisnis dan pajak. Salah satu inisiatif program yang paling populer bernama *Family 500 Plus*, suatu program yang dirancang untuk memacu keluarga di Polandia untuk memiliki keturunan lebih dari dua. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan populasi Polandia yang pada tahun 2050, Badan Pusat Statistik Polandia mengungkapkan pada tahun tersebut Polandia akan mengalami penurunan jumlah populasi dari 38,5 juta menjadi kurang dari 34 juta jiwa.¹⁸⁵

Polandia dihadapkan dengan tingkat kesuburan yang paling rendah pada masyarakatnya di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Pemerintahan Polandia kemudian memperkenalkan program baru yang berorientasi pada

¹⁸⁴ Alicja Ciszewska, "PiS Pick Szydlo as Candidate for PM", *WBJ*, diakses dari <http://wbj.pl/pis-named-its-official-pm-candidate/> pada 22 Nopember 2018.

¹⁸⁵ <https://www.forbes.com/profile/beata-maria-szydlo/#6a09b7d67dda>

pemberian manfaat kepada keluarga yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesuburan dan menekan tingkat kemiskinan anak.¹⁸⁶

Program *The Family 500+* dikenalkan pada April 2016, yang berisi tentang pembayaran sejumlah PLN 500 atau sekitar 140 Euro yang akan diberikan setiap bulan kepada setiap anak ke dua dan seterusnya sampai mereka berusia 18 tahun. Kemanfaatan dari program ini juga diperluas cakupannya dengan mencakup pemberian manfaat tersebut kepada anak pertama dalam keluarga yang penghasilannya di bawah ambang batas.¹⁸⁷

Beata Szydlo pernah menjabat sebagai *Member of Parliament* selama satu dekade. Selain itu, Ia pernah menjabat sebagai walikota termuda yaitu saat berusia 35 tahun di Provinsi Mapolska. Ia berhasil memukau mayoritas warga Polandia, khususnya pemimpin partainya, Jaroslaw Kaczynski, dengan kesuksesannya dalam kampanye pemenangan Andrzej Duda sebagai Presiden Polandia.¹⁸⁸ Kemenangan Andrzej Duda menjadi Presiden Polandia menjadi menarik dan mengejutkan hampir setiap orang dikarenakan pada saat itu, Duda berhadapan dengan kandidat petahana, Bronislaw Komorowski, yang dinilai lebih populer jika dibandingkan dengan Duda.¹⁸⁹

Berkat cemerlangnya kinerja Beata Szydlo sebagai ketua tim kampanye pemenangan Duda, yang selalu berada di sisi Duda pada saat melakukan safari kampanye ke seluruh wilayah Polandia, menemui serta mendengar sebisa dan

¹⁸⁶ Karolina Goraus-Tańska, "The Family 500+: Battling Child Poverty in Poland", *The World Bank*, diakses dari <http://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/family-500-battling-child-poverty-poland> pada 27 Nopember 2018.

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Adam Easton, "Beata Szydlo: Polish miner's daughter set to be PM" Op, cit.

¹⁸⁹ Ibid.

sebanyak mungkin warga Polandia membuat Jaroslaw Kaczynski mengakuinya dan menunjuk Beata Szydlo sebagai kandidat Perdana Menteri dari partainya.¹⁹⁰

Hal ini beriringan dengan menurunnya dukungan terhadap Partai *Civic Platform* yang telah memegang pemerintahan selama 8 tahun. Dengan menurunnya dukungan tersebut, dirasa penting untuk menampilkan wajah baru di Polandia. Meskipun dalam beberapa hal, Beata Szydlo kontras dengan atasannya, Kaczynski.¹⁹¹

Berdasarkan penjelasan tentang input dalam pengambilan keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017, penulis menemukan bahwa input yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan tersebut adalah struktur pemerintahan dan akuntabilitas politik. Hal ini ditunjukkan dengan dominansi kader partai PiS yang menduduki kursi pemerintahan, baik di eksekutif maupun yudikatif, sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengeluarkan keputusannya. Selain itu, dari sisi akuntabilitas politik dimana nilai-nilai dari partai pemenang pemilu diimplementasikan dalam pemerintahan sebagai salah satu upaya untuk menjaga akuntabilitas publik merupakan input yang berpengaruh dikarenakan PiS memiliki nilai-nilai anti-migran dan cenderung *eurosceptic*, yang kemudian membuat Polandia memutuskan untuk menolak pengungsi dengan tidak mengimplementasikan kebijakan skema relokasi dan *resettlement* Uni Eropa. Sedangkan dari faktor *moods of opinion*, penulis tidak menemukan adanya pengaruh terhadap keputusan Polandia dalam penolakan pengungsi tersebut.

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Ibid.

Tetapi, data opini publik yang ada menunjukkan bagaimana publik mendukung pemerintah Polandia dalam keputusannya menolak pengungsi.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam menghadapi suatu isu yang membutuhkan pengambilan keputusan yang relatif cepat, negara menggunakan faktor-faktor tertentu dalam pengambilan keputusannya. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017 dengan menggunakan Teori *Foreign Policy Inputs* karya James N. Rosenau.

Dengan banyaknya variabel dalam teori ini, Rosenau menganjurkan untuk melakukan *cluster of input*. Penulis atau peneliti dipersilakan untuk memilih variabel-variabel mana yang dianggap relevan digunakan dalam penelitian yang tentunya diharapkan dapat membuahkan penelitian komprehensif. Atas dasar itu, penulis menggunakan hanya menggunakan beberapa variabel yang penulis anggap relevan dan dapat menjelaskan dengan baik penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia masa pemerintahan Beata Szydlo tahun 2015-2017 dipengaruhi beberapa variabel, diantaranya dari sumber sistemik berupa aliansi, dan faktor situasional eksternal yang dijelaskan dengan indikator area isu dan krisis. Sedangkan dari sumber sosial dan pemerintahan, atau bisa disebut internal, penulis menggunakan variabel budaya dan sejarah, *moods of opinion*, akuntabilitas politik, serta sumber idiosinkratik Perdana Menteri Polandia.

Dari variabel-variabel tersebut ditemukan bahwa, aliansi yang diikuti Polandia berpengaruh terhadap keputusannya menolak pengungsi. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya *Joint Statement* di antara para Perdana Menteri negara anggota *Visegrad Group* yang berisi pertimbangan untuk memberikan bantuan di luar perbatasan kawasan Uni Eropa dengan membentuk kerjasama dengan negara ketiga. Selain itu, aliansi ini juga menitikberatkan pada penguatan perbatasan luar Uni Eropa untuk mencegah imigran ilegal dan perdagangan manusia. Polandia bersama negara-negara anggota V4 merupakan negara yang sampai tahun 2017 tidak mengimplementasikan skema relokasi dan *resettlement*.

Kemudian dari variabel faktor situasional eksternal, dapat ditemukan bahwa area isu keimigrasian di Eropa dan juga krisis keamanan yang dianggap timbul dari masuknya pengungsi ke kawasan Eropa sebagai pengaruh keputusan penolakan pengungsi oleh Polandia. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Beata Szydlo pasca serangan yang terjadi di Brussel, Belgia. Ia menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi Polandia untuk menerima satupun pengungsi setelah kejadian serangan tersebut.

Pada faktor-faktor internal, budaya dan sejarah Polandia memberikan pengaruh terhadap keputusan penolakan pengungsi ini. Polandia yang mempunyai citra diri sebagai pelindung Eropa dari pengaruh nilai-nilai asing, serta sejarah Polandia yang pernah berkontribusi dalam mengalahkan pasukan Kekaisaran Turki di masa silam menguatkan alasan Polandia untuk tidak menerima pengungsi, terlebih dengan latar belakang Muslim. Perbedaan agama dan budaya antara mayoritas pengungsi yang beragama Islam dan kebangsaan Timur Tengah dan Afrika dengan Polandia yang relatif homogen dengan kebangsaan Polandia

dan Katholik Roma, menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keputusan penolakan pengungsi.

Selanjutnya, opini publik Polandia juga menunjukkan hal senada. Berdasarkan survey *Pew Research Center*, di antara 10 negara Uni Eropa yang disurvei, Polandia menempati urutan teratas di antara negara-negara yang menganggap pengungsi yang berasal dari Suriah dan Iraq sebagai ancaman terhadap negaranya. Sebanyak 73% warga Polandia beranggapan demikian, disusul oleh Hungaria dan Yunani dengan 69%. Selanjutnya, Polandia juga masuk ke dalam 6 besar negara-negara yang tidak puas atau tidak setuju dengan bagaimana Uni Eropa menangani krisis migrasi yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan presentase sebanyak 71%.

Kemudian dari akuntabilitas politik dimana yang menduduki pemerintahan baik eksekutif, maupun legislatif Polandia mayoritas dari partai pemenang pemilihan umum tahun 2015 yaitu PiS, sangat berpengaruh terhadap keputusan penolakan pengungsi. PiS merupakan partai yang memiliki nilai anti-imigran. Hal ini kemudian menjadi cenderung mudah diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahannya karena PiS menduduki mayoritas kursi di parlemen dan pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan PiS dapat membentuk pemerintahan tanpa harus menegosiasikan dengan koalisi yang ada.

Dari sisi idiosinkratik Perdana Menteri Polandia sebagai kepala pemerintahan, penulis beranggapan bahwa Beata Szydlo memiliki nilai-nilai yang relatif sama dengan partai pengusungnya, yaitu cenderung anti-imigran. Hal ini juga ditunjukkan dengan pernyataannya yang tidak akan menerima pengungsi

selepas kejadian serangan di Brussel, serta menyatakan bahwa prioritas keamanan adalah untuk warganya. Sedangkan dari sisi talenta dan pengalaman, Beata Szydlo memiliki pengalaman sebagai walikota, anggota parlemen, dan ketua tim pemenangan Andzrej Duda pada pemilu Presiden Polandia 2015 dan berhasil memenangkannya. Keberhasilan ini dianggap luar biasa karena pada saat itu, Duda berhadapan dengan petahana yang dinilai lebih populer, namun hasil pemilu menyatakan bahwa Duda menduduki kursi kepresidenan Polandia mengalahkan kandidat petahana.

6.2. Saran

Penelitian ini sangat bisa dikembangkan dengan menggunakan teori atau konsep dalam hubungan internasional lainnya sehingga dapat memperkaya sudut pandang dalam menganalisis isu ini ataupun isu lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa juga dilakukan penelitian dengan objek yang berbeda, misalnya negara yang diteliti, baik menggunakan teori atau konsep yang sama maupun berbeda. Bahkan dalam teori ini pun, masih terdapat variabel-variabel yang penulis tidak gunakan dalam penelitian dikarenakan kecenderungan untuk melihat relevan tidaknya variabel tersebut dalam penelitian ini. Untuk itu, dalam penelitian selanjutnya, variabel-variabel tersebut kemungkinan bisa digunakan sesuai dengan relevansinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Jurnal dan Tesis

Aras, N. Ela Gokalp. dan Zeynep Sahin Mencutek. "The International Migration and Foreign Policy Nexus: The Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey," *Migration Letters*, Volume 12, No: 3 (September 2015).

Hampshire, James. *The Politics of Immigration*. 2013 (Cambridge: Polity Press).

Kaerens, Heggy. *Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra-Terrorisme pasca Serangan Bom Bali I*. Tesis, 2012. (Jakarta: Universitas Indonesia).

Roguska, Beata. "Polish Public Opinion: Attitude to Islam and Muslim." *Trans. Michal Wenzel*. 2015 (Warszawa: CBOS).

Rosenau, James N, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*. 1976. New York: The Free Press.

Teitenbaum, Michael. "Immigration, Refugees, and Foreign Policy". *International Organizations*, Vol. 38, No. 3 (Summer, 1984).

Sumber Internet

Armandhanu, Denny. "Polandia Membangkang Uni Eropa, Tolak Terima Pengungsi", *CNN Indonesia*, 10 Mei 2016,
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi/>

Broomfield, Matt. "Poland refuses to take a single refugee because of 'security' fears", *Independent.co.uk*, 9 Mei 2016,
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-refuses-to-take-a-single-refugee-because-of-security-fears-a7020076.html>

Chatam House The Royal Institute of International Affairs, What Do Europeans Think About Muslim Immigration?,
<https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration>

Ciensi, Jan. *'Migrants Carry "parasites and protozoa," warns Polish Opposition Leader,' Politico*, diakses dari <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>

Ciensi, Jan. "Why Poland doesn't want refugees", *Politico*, 26 Mei 2017, <http://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/>

Ciszewska, Alicja. "PiS Pick Szydło as Candidate for PM", *WBJ*, diakses dari <http://wbj.pl/pis-named-its-official-pm-candidate>

Colombo, Silvia. "Slouching Toward Ankara: The EU-Turkey Migration Deal", *Council of Councils*, https://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p37825

Council of the European Union, *Council Decision establishing provisional measures in the area of international protection for benefit of Italy and Greece*. Legal Acts and Other Instruments, Brusel 22 September 2015.

Doomernik, Jeroen dan María Bruquetas-Callejo. "National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973", Chapter 4 dalam *Integration Processes and Policies in Europe Contexts, Levels and Actors*, diakses dari <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-21674-4.pdf>

Easton, Adam. "Beata Szydło: Polish miner's daughter set to be PM", *BBC NEWS*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-34619037>

European Commission - Press Release, *Relocation and Resettlement: EU Member States urgently need to deliver*, Brussels 16 Maret 2016, diakses dari http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-829_en.htm

Eurostat, "Asylum Statistics", http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

Grzymala-Busse, Anna. "Poland's right-wing government has a new prime minister. Here are the 5 things you need to know" diakses dari

<https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/12/12/polands-right-wing-government-has-a-new-prime-minister-here-are-the-5-things-you-need-to-know>

Haas, Hein de. "European Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Policies", Publications Office of the European Union, Luxembourg: 2018
diakses dari

<http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109783>

Harding, Luke. "Refugee crisis: Germany reinstates controls at Austrian border", *The Guardian*, 13 September 2015,
<https://www.theguardian.com/world/2015/sep/13/germany-to-close-borders-exit-schengen-emergency-measures>

Hardoko, Ervan. "Pasca-bom Brussels, Polandia Tolak Tampung Pengungsi", *Kompas.com*, 24 Maret 2016,
<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/24/15084971/>

Hokovský, Radko. "How migrants brought Central Europe Together", *POLITICO.eu*, 7 Februari 2017, <http://www.politico.eu/article/how-migrants-brought-central-europe-together-visegrad-group-orban-poland/>

Hughes, Helen "Immigrants, Refugees, and Asylum Seekers: A Global View", The Centre for Independent Studies Policy Monograph 54. diakses dari
<http://www.cis.org.au/app/uploads/2015/07/pm54.pdf>

Jan Puhl, "Polish Elections: Law and Justice Party Regains Credibility by Dialing Down Rhetoric", diakses dari
<http://www.spiegel.de/international/europe/beata-szydlo-revamps-polish-law-and-justice-party-ahead-of-elections-a-1058506.html>

Jaskiernia, Jerzy. "The Development of the Polish Party System: a Perspective of the Parliamentary Elections Results", *Polish Political Science Yearbook*, vol. 46 (2) (2017), <https://www.researchgate.net/publication/322285954>

- Kaminski, Lukasz dan Maciej Korkuc, *A guide to the history of Poland* (Krakow: Instytut Pamieci Narodowej, 2016).
- M. Polskość, Klajn. *The Legacy of Polish Past in its Present Identity Struggles*.
Diakses dari https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centrecriminology/centreborder_criminologies/blog/2018/01/Polskosc-legac
- Pilat, Anna dan Dominika Potkanska. *Local Responses to the Refugee Crisis in Poland*, halaman 7, diakses dari
http://www.forintegration.eu/uploads/drive/publikacje/local_poland.pdf
- Poushter, Jacob. "European opinions of the refugee crisis in 5 charts", *Pew Research Center*, 16 September 2016, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/>
- Saju, Pascal S Bin. "Mayoritas Orang Eropa Percaya Imigrasi Tingkatkan Ancaman Teror", *Kompas.com*, 13 Juli 2016,
<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/08465581/>
- Shalal,Andrea. "Germany's Schaeuble admits 'mistakes' in refugee policy", *Reuters*. 29 Januari 2017. <http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-idUSKBN15D0CO>
- Zdzislaw, Mach. "Polish National Culture and its Shifting Centres", *Centre for European Studies Journal* (2000). www.humanityinaction.org/files/278-Polish_National_Culture_and_its_Shifting_Centres.pdf